

**DINAMIKA GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN IRAN (PRA & PASCA  
REVOLUSI 1979)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



**Oleh:**

**ANIS SHOFIYAH**

**NIM : A92215029**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anis Shofiyah

NIM : A92215029

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,



**Anis Shofiyah**

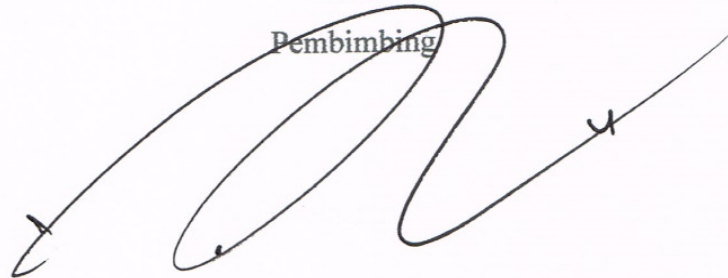
**NIM. A92215029**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, 05 April 2019

Oleh  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

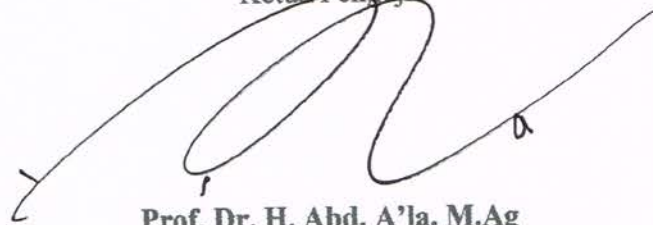
**Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag**

**NIP. 195709051988031002**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini atas nama Anis Shofiyah (A92215029) telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus pada 11 April 2019

Ketua/Penguji



**Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag**  
**NIP. 195709051988031002**

Penguji II



**Prof. Dr. H. Aliwan Mukarrom, M.A**  
**NIP. 195212061981031002**

Penguji III



**H.M. Khodafi, M.Si**  
**NIP. 197211292000031001**

Sekretaris/Penguji IV



**Dwi Susanto, MA.**  
**NIP. 197712212005011003**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel



**Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag**  
**NIP. 196210021992031001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anis Shofiyah  
 NIM : A92215029  
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah peradaban Islam  
 E-mail address : shofiyahanis39@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

"Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (pra & pasca Revolusi 1979)"

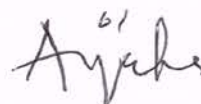
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis



( Anis Shofiyah )  
*nama terang dan tanda tangan*



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra dan Pasca Revolusi 1979)”. Dengan fokus permasalahan : (1) bagaimana kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi? (2) bagaimana kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi? (3) bagaimana bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah revolusi?.

Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori gerakan sosial dan teori gender. Teori gerakan sosial menurut Piotr Sztompka adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan teori gender secara umum menjelaskan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi mengalami berbagai perubahan. Gerakan perempuan Iran mulai terlihat setelah adanya wacana modernitas di Iran, yang di buat pada masa Dinasti Qajar dan diperluas pada masa Rezim Pahlevi. Pada masa Dinasti Qajar gerakan perempuan Iran secara umum masih terbatas pada ranah keluarga, namun saat Rezim Pahlevi berkuasa gerakan perempuan Iran mulai terlihat di wilayah publik. (2) Kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi juga berubah-ubah. Pada masa Ayatullah Khomaeni menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi, seluruh kebijakan yang dibuatnya disesuaikan dengan syariat Islam. Perempuan kembali mengalami pembatasan di wilayah publik, terutama mengenai hak-hak mereka. Setelah Khomaeni wafat, pembatasan terhadap perempuan sedikit berkurang, kemudian pada masa Khatami, pembatasan mengenai perempuan semakin berkurang. Namun pada masa Ahmadinejad gerakan perempuan mengalami berbagai pembatasan lagi seperti pada masa awal setelah revolusi. (3) Bentuk dan gerakan perempuan Iran setelah revolusi semakin terlihat meskipun mendapatkan berbagai tekanan dan pembatasan dari ulama konservatif. Perempuan selalu berusaha untuk menuntut keadilan dan kesetaraan di berbagai bidang agar diberi hak yang sama dalam berbagai hal. Bentuk lain dari gerakan perempuan Iran adalah dengan terlibat dan masuknya perempuan dalam pemerintahan serta peran mereka di bidang sosial dan publik.

**Kata Kunci: Perempuan Iran, Sosial, dan Perubahan.**

This thesis entitled "The Dynamics of Women's Social Movement of Iran (Pre and Post-Revolution of 1979)". With the focus of the problem: (1) how the condition and Iranian women's movement before the revolution? (2) how the government's policy towards women in post-revolution Iran? (3) how the shape and movement of Iranian women after the revolution?.

The results of this study concluded that: (1) the conditions and the Iranian women's movement before the revolution underwent several changes. Iranian women's movement began to look after their discourse of modernity in Iran, which in the period of the Qajar dynasty and expanded during the Pahlavi regime. During the Qajar dynasty Iranian women's movement in general is still confined to the realm of the family, but when the Pahlavi regime ruling Iran women's movement began to be seen in public areas. (2) The government's policy against women in post-revolution Iran also changing. At the time of Ayatollah Khomeini served as Supreme Leader, all policies are made adapted to Islamic law. Women re-experiencing restrictions in public areas, especially regarding their rights. After Khomeini died, restrictions on women slightly reduced, then at the time of Khatami, restrictions on women wane. However, during the women's movement Ahmadinejad suffered various restrictions again like in the early days after the revolution. (3) The shape and movement perempuan Iran after the revolution more visible despite getting a wide range of pressures and restrictions of conservative clerics. Women are always trying to demand justice and equality in various fields in order to be given equal rights in various ways. Another form of the Iranian women's movement is involved and the inclusion of women in government and their role in the social and public.

**Keywords:** Iranian Women, Social, and Change.







**DAFTAR PUSTAKA .....133**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## PENDAHULUAN

Kaum perempuan tidak selalu mendapat tempat yang nyaman dan menyenangkan di mana mereka berada. Sebelum masa emansipasi dan gerakan perempuan di berbagai belahan dunia mulai muncul, perempuan masih dianggap sebagai manusia kelas dua.<sup>1</sup> Perempuan yang dianggap sebagai manusia kelas dua juga mempunyai kesamaan semangat persamaan hak antar gender. Ketika Islam datang, derajat perempuan diangkat, dan derajat mereka disamakan antara perempuan dan laki-laki, karena yang membedakan hanyalah kadar ketakwaan mereka.<sup>2</sup>

Sebagaimana gerakan perempuan di Iran juga mengalami perkembangan yang begitu pesat, sebelum adanya revolusi Islam Iran,

<sup>3</sup> Ariana Suryorini, “Menelaah Feminisme dalam Islam”, dalam *Jurnal Penelitian SAWWA*, Volume 7, Nomor 2, April 2012, 23.

Meskipun emansipasi perempuan dari norma-norma tradisional telah berlangsung dalam pemerintahan Pahlevi, namun dalam hal-hal krusial di dalam perundangan keluarga dan perundangan hak-hak politik nyaris tidak mengalami perubahan. Praktik perceraian (*thalaq*) tetap sebagai sesuatu yang enteng dan mudah bagi laki-laki. Pengasuhan anak tetap menjadi kewajiban utama pihak perempuan. Poligami dan perkawinan *mut'ah* tetap saja diizinkan. Hanya dengan undang-undang perlindungan keluarga tahun 1967 dan tahun 1975 hak prerogatif perempuan sebagian terlindungi oleh legislasi yang mensyaratkan perceraian harus disampaikan di pengadilan dan mensyaratkan izin istri untuk perkawinan poligami.<sup>4</sup>

Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam bagin Tiga* (Jakarta: PT Raja Gra

Kekuasaan Shah yang semakin hari semakin semena-mena menjadikan masyarakat Iran murka, begitu juga dengan perempuan. Sehingga tanda-tanda pertama Revolusi mulai muncul pada tahun 1963, hingga berakhir pada kemenangan Revolusi pada bulan Februari 1979. Pada saat revolusi berlangsung, muncul tanda-tanda perempuan kembali ke diri sendiri dan kebangkitan kembali identitas yang disembunyikan selama periode kekerasan dan kontrol Amerika atas Iran. Fenomena perempuan mengenakan jilbab di publik menyebar dan merupakan contoh perlawanan yang bersinar.<sup>6</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kemenangan Revolusi Islam dan memberikan dukungan tanpa batas kepada para pemimpin sebagaimana dinyatakan oleh Pemimpin Revolusi. Ayatollah Khomeini juga takjub akan peran perintis dan pemimpin perempuan dalam

<sup>6</sup> Ansia Khaz Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution*, 3.



Setelah revolusi Iran berlangsung, Ayatollah Khomeini memberlakukan peraturan yang berbeda kepada para perempuan Iran, yakni dengan mengembalikan fitrah perempuan di jalan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan memerintahkan perempuan Iran agar kembali menggunakan Hijab atau penutup kepala untuk perempuan di Iran.<sup>8</sup> Sebuah revolusi populis di 1978-1979 mengakhiri tradisi lama monarki Iran, menggantikannya dengan republik Islam yang unik, dimana para ulama agama memegang kendali politik di bawah pemimpin tertinggi, yakni Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Meskipun partisipasi yang dilakukan besar-besaran oleh perempuan Iran dalam revolusi dan peningkatan berikutnya yakni dalam tingkat dan bentuk kehadiran sosial perempuan dan prestasi pendidikan, namun, Republik Islam membawa banyak perubahan negatif untuk hak-hak perempuan dan kebebasan pribadi. Perempuan mengalami diskriminasi dalam sektor publik, dan kemunduran dalam status pribadi

<sup>8</sup> Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution*, 5.

Namun sejak tahun 1979-2005 menjadi salah satu jalan yang sulit bagi perempuan Iran. Pertama, mereka kalah besar dari Revolusi, karena melihat posisi status dan sosial hukum mereka secara dramatis menurun dalam nama kebangkitan agama. Diantaranya larangan penyanyi perempuan, pengucilan dari kekuasaan politik, marginalisasi ekonomi, dan menambahkan luka kembalinya perceraian sepihak, poligami, dan pernikahan sementara beberapa dari hasil gender mengerikan yang ditandai sepuluh tahun pertama Revolusi Islam. Dekade kedua dalam Republik Islam juga terlihat dengan munculnya pergeseran kebijakan, kepemimpinan baru, dan meningkatnya harapan masyarakat. Janji-janji reformasi, dan bagaimanapun pemerintah tidak menyadari akan janji-janji tersebut, sehingga terjadi gerakan protes dari akhir 1990-an yang terlarut dari keretakan internal maupun represi eksternal. Namun demikian, banyak perubahan sosial telah terjadi-dalam dinamika keluarga, diantaranya adalah pencapaian pendidikan, politik budaya, dan peran sosial perempuan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Valintine M. Moghadam, *Women in The Islamic Republic of Iran : Legal Status, Social Politions, and Collective Action*, 1.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membatasi penulisan agar pembahasan tidak melebar, maka penulis hanya membatasi pada gerakan sosial perempuan Iran baik sebelum maupun sesudah revolusi, dan perjalanan kiprah perempuan di Negara Iran. Dengan demikian, permasalahan yang dapat penulis jelaskan dapat dibagi ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi.
3. Untuk menjelaskan bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah revolusi.

#### D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana sejarah pemerintahan Iran dibawah penguasa yang berbeda-beda, mulai dari pemerintahan Rezim Shah Pahlevi, hingga pemerintahan setelah terjadinya revolusi Iran, dan kondisi serta gerakan-gerakan perempuan Iran di dalam pemerintahan yang berbeda tersebut.
2. Untuk menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya tulis ilmiah. Serta bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam.

Penulisan suatu karya sejarah tentunya juga diperlukan suatu pendekatan-pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, karena pada hakikatnya, sebuah ilmu tidak dapat berdiri sendiri dan berkaitan dengan ilmu lain atau sering disebut interdisipliner. Untuk menganalisis lebih sebuah karya, maka diperlukan metodologi dan teori yang dilihat dari sudut pandang atau pendekatan sesuatu. Pendekatan dari berbagai aspek diharapkan dapat menghasilkan karya tulis sejarah yang dikaitkan dengan masalah-masalah dalam ilmu-ilmu sosial.

Sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu yang menunjukkan fungsinya yang setara dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan mengenai ilmu pengetahuan. Kecenderungan seperti itu maka akan semakin nyata apabila penulisan sejarah tidak hanya tentang kisah, dongeng-dongeng kedaerahan yang mengandung unsur-unsur mitos didalamnya, melainkan penulisan sejarah yang didalamnya terkandung eksplanasi kritis dan ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimana menurut Sartono Kartodirjo pendekatan sosiologis



Deskripsi dalam sejarah sosial sebagai “peta sosial” gejala sejarah akan mencakup golongan sosial, jenis hubungan sosial, pelapisan sosial, peranan dan status sosial, dan lain sebagainya. Jadi, suatu gejala sosial sangatlah wajar dan relevan untuk dipelajari dengan pendekatan sosiologi.<sup>12</sup> Menurut Sartono Kartodirjo Prespektif sosial (sosiologi) meningkatkan kemampuan untuk mengekstrapolasikan berjenis-jenis aspek sosial masyarakat atau gejala sejarah yang dikaji, seperti adanya pelbagai golongan sosial, jenis-jenis kepemimpinan, macam-macam ikatan sosial, dan lain sebagainya. Ilmu sosiologi juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran dan pengaruh dari suatu institusi terhadap perkembangan komunitas yang mengitarinya.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial, banyak pakar yang menyimak peran khas gerakan sosial. Mereka melihat gerakan sosial sebagai salah satu cara utama untuk menata ulang masyarakat modern (Blummer, 1951); sebagai pencipta perubahan sosial (Killian, 1964); sebagai aktor historis (Touraine, 1977); sebagai

<sup>12</sup> Ibid., 144.

Menurut Piotr, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Adapun ciri gerakan sosial yakni wujud kesukuan untuk berubah di kalangan anggota masyarakat atau upaya kolektif khusus untuk menyatakan keluhan dan ketidakpuasan dan atau mendorong atau menghambat perubahan. Hal ini senada dengan penelitian yang ditulis peneliti, bahwa perempuan-perempuan di Iran bersatu untuk mendorong pemerintah serta menyatakan keluhan-keluhan lewat media massa atau tulisan-tulisan yang mereka tulis, sehingga pada akhirnya mereka membentuk sebuah organisasi atau perkumpulan untuk wanita-wanita di Iran dalam rangkaiam memajukan potensi perempuan di Iran.

Menurut Burns, 1985 dalam bukunya Piotr, bahwa gerakan sosial mengemban struktur sosial dalam bentuk sistem hukum yang diperoleh dan pada waktu bersamaan gerakan ini menciptakan, mencipta ulang dan merombak sistem hukum melalui tindakannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Dieter Rucht bahwa gerakan sosial pada waktu bersamaan adalah ciptaan sekaligus pencipta pola masyarakat. Meski

Secara historis gerakan sosial adalah fenomena universal. Rakyat diseluruh masyarakat manusia tentu mempunyai alasan untuk bergabung dan berjuang untuk mencapai tujuan kolektif mereka dan menentang orang yang menghalangi mereka mencapai tujuan itu. Ada gerakan yang menekankan pada inovasi, berjuang untuk memperkenalkan institusi baru, hukum baru, bentuk kehidupan baru, dan keyakinan baru. Singkatnya, gerakan ini ingin membentuk masyarakat ke dalam satu pola yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Orientasi gerakan ini adalah ke masa depan. Perubahan diarahkan ke masa depan dan menekankan pada sesuatu yang baru.<sup>14</sup> Dalam hal ini perempuan Iran berperan aktif dalam gerakan-gerakan yang dibentuk oleh perempuan Iran, guna menunjukkan bahwa perempuan bisa terlibat dalam hal-hal yang biasa dilakukan oleh lelaki. Perempuan juga mampu menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan sosial maupun dalam hal lainnya seperti pendidikan, ekonomi, maupun politik.

Menurut Harien dalam konsep teori dan analisis gender  
gender sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung  
jawab.

---

d., 333.

Menurut Ihromi, gender adalah interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin dan hubungan laki-laki perempuan. Kadang-kadang, interpretasi mental ini lebih merupakan keadaan ideal daripada apa yang sesungguhnya dilakukan dan dilihat. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi pria dan wanita. Seringkali kegiatan didefinisikan sebagai milik laki-laki atau perempuan yang diorganisasikan dalam hubungan saling ketergantungan.<sup>16</sup> Gender sebagai suatu konsepsi, mengacu pada pengertian bahwa di lahirkan sebagai laki-laki atau perempuan keberadaannya berbeda-beda dalam waktu, tempat, kultur, bangsa maupun peradaban. Keadaan itu berubah-ubah dari masa ke masa.

n Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender* (Bogor: PT IPB Press, 2013), 1.  
 thromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 171.

<sup>16</sup> T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 171.





*Kedua*, “Gerakan Perempuan di Republik Islam Iran Pasca Revolusi 1979” yang ditulis oleh M. Kamaluddin (2011), dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penulisan ini dijelaskan bagaimana peran perempuan setelah revolusi Iran, dan bagaimana posisi perempuan setelah adanya revolusi Iran, namun dalam penulisan ini posisi dan peran perempuan yang dijelaskan hanya dalam lingkup pendidikan dan politik, itupun hanya sedikit dibahas pertumbuhan dan perkembangan perempuan Iran setelah revolusi Iran.

*Ketiga*, Jurnal “POLITIK DAN PEREMPUAN : p  
perempuan di Iran pasca revolusi Islam 1979” yang c  
Ismail (2015), dari UIN Raden Fattah Palembang. Dalam  
dijelaskan tentang perjuangan gerakan politik yang  
perempuan Iran setelah revolusi 1979. Womens politi  
dasar kebijakan pemerintah yang tidak memuaskan p  
karena selama ini politik hanya menjadi bagian atau ranah



- 1) Buku dengan judul “Revolusi Iran” yang ditulis oleh wartawan Indonesia Nasir Tamara yang bekerja di Paris, dan yang mengikuti Khomeini saat kembali ke Iran pada saat Revolusi Iran berlangsung.
- 2) Buku dengan judul “Women and the political process in twentieth-century Iran”, yang ditulis oleh Parvin Paidar.
- 3) Buku yang berjudul “Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling” ditulis oleh Hamidah Sedghi, dan telah dipublikasikan oleh United States Of America by Cambridge University Press, New York.

- ## 2. Kritik

Setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitian, kita tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyaring secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihan. Langkah-langkah inilah disebut kritik sumber.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 83.

perbandingan antar sumber. Sedangkan kritik intern merupakan penilaian atas kredibilitas sumber sejarah itu sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan kolasi, yaitu membandingkan antara isi satu dengan sumber yang lain.

Pada proses ini, setelah peneliti mengumpulkan berbagai sumber dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, kemudian peneliti mencoba untuk melihat lagi, apakah data tersebut relevan dengan penelitian yang akan ditulis peneliti. Dilihat dari segi pengarangnya terlebih dahulu, apakah pengarang artikel atau jurnal tersebut merupakan subjek atau pelaku sejarah dari salah satu gerakan perempuan di Iran, ataukah penulis jurnal tersebut memang hidup di Iran tapi tidak ikut andil dalam gerakan-gerakan perempuan Iran.

Namun sebagai contoh, peneliti hanya mengkritik pengarang dari beberapa buku atau jurnal seperti yang tertera diatas, karena bahasan atau isi yang ditulis menurut peneliti sudah seperti yang peneliti inginkan, dan yang dibahas antara peneliti yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr Ansia Khaz Ali, dengan judul “Iranian Women After The Islamic Revolution” bahwasanya Dr Ansia Khaz Ali adalah seorang profesor yang meraih gelar PhD dalam bahasa dan sastra Arab dari Universitas Teheran. Saat tahun 2010 lalu, dia bekerja sebagai Profesor di empat universitas di Iran dan dia adalah



seorang Dekan Institut Human Ilmu Pengetahuan dan Bahasa Asing di A-Zahra University di Teheran. Dia juga mengajar tentang masalah yang terkait dengan wanita di berbagai negara Arab. Dia juga seorang aktivis di berbagai aspek hak-hak wanita dan telah menerbitkan banyak artikel dan makalah di bidang ini. Peneliti mampu mengatakan bahwa tulisan Ansia Ali bisa menjadi sumber karena beliau sendiri penulis yang berasal dari Iran dan ikut serta dalam gerakan-gerakan perempuan yang ada di Iran, dan artikel ini juga menjadi rujukan banyak dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perempuan Iran.

Yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Hamideh Sedghi, dengan judul “Women and Politics in Iran : Veiling, Unveling, and Reveiling”. Dalam hal ini, buku tersebut juga banyak menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lain, karena dia adalah perempuan Iran pertama yang sekarang tinggal di Amerika, dan orang pertama di Amerika yang menulis tentang perempuan Iran dari prespektif ilmu sosial. Disamping menjadi seorang profesor di berbagai universtitas, dia juga menjadi seorang penulis yang tulisannya sudah banyak dipublikasikan, sehingga dia mendapatkan banyak penghargaan dan kehormatan.

Ketiga adalah yang ditulis oleh Nayereh Tohidi, dengan judul “ Iran” dalam jurnal Womens rights in the middle east and north Africa. Tohidi merupakan profesor kelahiran Iran di gender

keempat Konferensi Dunia tentang Perempuan di Nairobi (Forum 1985) dan Beijing (Forum LSM 1995) tentang gender dalam Iran dan pasca-Soviet Kaukasus dan Asia. Pada tahun 2001, ia menjadi penyiar dalam program mingguan pada “Perempuan dan Masyarakat di Iran” dan ke Iran, Asia Tengah, hingga Eropa melalui Radio Free Radio Liberty. Berbagai tulisannya pun banyak dite-

### 3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali di  
dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti mengur  
secara terminologis berbeda dengan sintesis yan  
menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis,

Dalam penelitian ini kita menggunakan teori gerakan sosial untuk menganalisis sebuah masalah. Dengan menggunakan teori ini kita dapat menggabungkan sebuah data yang kita peroleh dan sudah melalui proses kritik dengan teori yang kita gunakan, dari proses penggabungan inilah akan terciptanya sebuah fakta. Seperti halnya sumber-sumber yang kita peroleh tentang perjuangan perempuan Iran dalam banyak segi kehidupan, terutama dari segi sosialnya yang sudah selesai kita kumpulkan dan dipilah, kemudian kita kritik dan analisis. Data-data ini kita gabungkan dengan sebuah teori yang kita pakai yaitu teori gerakan sosial. Dan dari proses penggabungan antara teori dan data inilah yang kemudian akan menciptakan sebuah fakta.

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sisni merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian sejarah ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi atas beberapa bab, untuk sistematika pembahasan lebih lanjut, penulis akan membagi sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang garis besar penelitian, termasuk di dalamnya mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika bahasan. Melalui bab ini akan di ungkapkan gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan penelitian, sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

Bab II, membahas mengenai kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi. Yang didalamnya menjelaskan sejarah Iran terlebih dahulu dengan berfokus pada masuknya wacana modernitas di Iran hingga

pengaruh modernitas terhadap gerakan perempuan Iran. Fokus selanjutnya pada kondisi perempuan Iran di bawah kebijakan Rezim Pahlevi hingga adanya gerakan-gerakan perempuan Iran sebelum Revolusi.

Bab III, membahas tentang kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi. Menjelaskan gambaran perempuan Iran dibawah pemerintahan Iran yang berbeda-beda. Dimulai dari perjalanan Ayatullah Khomaini (1979-1981) dalam membangun Iran setelah revolusi dan kebijakannya terhadap perempuan Iran. Gambaran seperti ini berlangsung hingga pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad.

Bab IV, membahas tentang bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah Revolusi. Bentuk-bentuk tersebut diantaranya bagaimana gerakan perempuan Iran setelah revolusi, masuknya perempuan dalam pemerintahan, hingga peran perempuan Iran dibidang sosial dan publik.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## KONDISI DAN GERAKAN PEREMPUAN IRAN SEBELUM REVOLUSI

## 1. Sekilas tentang Iran

Dataran Iran menghubungkan tiga wilayah Asia, yaitu Asia Barat, Tengah dan Selatan. Iran terletak di Timur Tengah, antara Turki dan Irak di sebelah barat dan Afghanistan dan Pakistan di sebelah timur; berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan dan Armenia, Azerbaijan, Laut Kaspia, dan Turkmenistan di utara. Iran

<sup>24</sup>W.B. Fisher, "Physical Geography", dalam *The Cambridge History of Iran* (Cambridge: The Press Syndicate of The University of cambridge, 1968), 3.

Fitur Fisik Iran terdiri dari beberapa pegunungan disekitarnya yang memiliki interior cekungan yang tinggi. Rantai gunung utama adalah Pegunungan Zagros, beberapa puncak di pegunungan Zagros melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut, dan di wilayah selatan-tengah negara setidaknya ada lima puncak yang lebih dari 4.000 meter. Ketinggian rata-rata dataran tinggi ini sekitar 900 meter, namun ada juga beberapa pegunungan menara di atas dataran tinggi melebihi

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Perdaban Islam Persia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 59.



Iran memiliki iklim variabel. Di barat laut, terdapat musim dingin dengan hujan salju yang berat selama bulan Desember dan Januari. Beserta Musim Semi, musim gugur, dan musim panas. Di selatan, musim dingin lebih ringan dan musim panas sangat panas, suhu rata-rata pada bulan Juli melebihi 38° C. Secara umum, Negara Iran kebanyakan beriklim kering atau semi kering, di mana sebagian besar curah hujan tahunan relatif sedikit yang jatuh dari Oktober sampai April.<sup>28</sup>

Iran adalah negara yang beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis dan bahasa yang bersatu melalui kebangsaan Iran. Syiah Islam menjadi agama resmi Iran. Setidaknya 90% dari penduduk Muslim Iran adalah Muslim Syiah, dan sekitar 8 persen adalah Muslim Sunni. Agama lain yang hadir di Iran adalah Kristen (terutama Armenia dan Assyria, lebih dari 300.000 pengikut), iman Baha'i, Zoroastrianisme, dan Yudaisme. Konstitusi mengakui Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme sebagai agama minoritas yang sah. Dan sejak tahun

<sup>28</sup> Ibid., 88.



<sup>34</sup> Nasir Tamara, *Revolusi Iran* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), 37.

Sejalan dengan itu, hubungan antara Rezim Qajar dengan ulama banyak terjadi ketegangan karena kebijakan Rezim Qajar banyak bertentangan dengan kalangan ulama. Muhammad Shah (1834-1848) membuat kebijakan keagamaan yang anti ulama' dengan mengambil metode pemerintahan ala Barat. Ketegangan semakin meningkat pada saat pemerintahan Nasir al-Din (1848-1896), ia membuat kebijakan yang membatasi hak keagamaan ulama' dengan terbatas pada tempat masjid dan tempat (makam) suci, serta mengurangi sumbangan dana, dan memprakarsai pendirian sekolah-sekolah sekuler sebagai tandingan sekolah-sekolah ulama'.<sup>35</sup>

Ketengangan semakin menguat akibat Shah sudah tidak berdaya di bawah kolonialisme. Serangkaian penaklukan Eropa, pengaruh kultural, dan terlebih penetrasi ekonomi Eropa mempertentangkan

<sup>36</sup> Poupak Tafreshi, "The Struggle for Freedom, Justice, and Equality : The History of The Journey of Iranian Women in The Last Century", (tesis, Washington University, st.Louis, 2010), 21.

Tahap kedua dari wacana modernitas datang selama tahun 1920 hingga tahun 1940-an, yang ditandai sebagai era pembangunan bangsa. Negara nasionalis yang didirikan oleh Reza Shah Pahlavi (1925-1941) setelah pembubaran dinasti Qajar, tampaknya untuk memenuhi

<sup>38</sup> Tamara, *Revolusi Iran*, 45.

Begitu juga dengan pemerintahan Raja Dinasti Pahlevi yang kedua, yakni Shah Reza Pahlevi yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1919 atau yang biasa disebut sebagai Reza Pahlevi naik ke tahta pada tanggal 17 Desember 1941 menggantikan ayahnya yang diasingkan. Reza Pahlevi memulai pemerintahannya sama dengan ayahnya bahkan ia melanjutkan kebijakan ayahnya dengan semakin otoriter. Iran mengakhiri era sistem monarki konstitusionalis dan menjelma menjadi monarki diktator.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Parvin Paidar, *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran*, 82.

bondong melamar menjadi pekerja buruh suatu pabrik, daripada menjadi petani.<sup>41</sup>

Kebijakan-kebijakan yang di buat oleh Reza Pahlevi semakin membuat pertentangan dengan seluruh perdana menteri yang telah diangkatnya. Banyak kebijakan dari Reza Pahlevi ditentang oleh berbagai kalangan yang tergabung dalam Front Nasional di bawah pimpinan Mossadeq, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pada tahun 1951. Pada tahun 1953 terjadi konflik politik antara Shah Iran dan Mossadeq yang mengakibatkan digesernya Mossadeq dari kedudukannya.

Mundurnya Mossadeq membuat Amerika masuk ke Iran menggantikan Inggris disegala bidang. Reza Pahlavi kembali memegang kekuasaan seorang diri dengan dukungan Amerika Serikat. Ia melakukan tindakan keras terhadap pendukung-pendukung Mossadeq. Setelah mundurnya Mossadeq, terjadi pembersihan pembangkangan dikalangan tentara sekitar 600 perwira ditangkap dan 41 orang ditembak mati. Polisi politik (SAVAK) dibentuk tahun 1957, dan hanya satu partai politik yang pro pemerintahan yang dibolehkan, dan para Ulama' ditekan habis habisan. Dan sejak saat itu penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang wenang menjadi bagian sehari-hari dari tindakan Reza Pahlevi dalam

<sup>41</sup>Sidik Jatmika & Vonny Nuansari, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran* (Yogyakarta: LPPI, 2002), 11.



Jauh sebelum revolusi Iran 1979, Ayatullah Khomeini merupakan salah seorang Mullah yang karismati. Ia mulai menonjolkan dirinya ke publik, yang saat itu berada di pengasingan dan ia mengecam Shah yang dianggap sudah merusak Islam dengan segala reformasi kebijakannya. Pada tanggal 5 Juni 1963, Khomeini ditangkap. penangkapan Khomaini membuat rakyat melakukan protes demonstrasi besar-besaran di Teheran, Qom dan kota-kota lainnya. Khomeini dibebaskan pada April tahun 1964, namun kembali ditangkap pada bulan Oktober, hingga pindah tempat pengasingan di Najaf sampai 1978.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Tamara, 46-51.

### 3. Pengaruh wacana modernitas terhadap gerakan perempuan Iran

Perempuan bergabung dalam upaya untuk konstitusi. Mereka berbalik pertemuan dari pertemuan tradisional sosial dan keagamaan ke pertemuan-pertemuan politik. Perempuan belajar tentang peristiwa politik terbaru di masjid-masjid dan *rowzeh*, dan dibahas dalam kelompok rahasia mereka. Kegiatan politik perempuan dalam periode ini berkisar dari informasi yang beredar, menyebarkan berita, bertindak sebagai informan dan utusan, berpartisipasi dalam demonstrasi, dan mengangkat senjata protes.<sup>44</sup>

Perubahan pada perempuan Iran mulai terjadi pada Pemerintahan Qajar (1794-1925), khususnya, pada akhir abad ke-19 dan akhir dari pemerintahan Nasser al-Din Shah. Gerakan perempuan Mengalami berbagai perubahan nyata dan mulai memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat dan menjadi lebih terlihat.<sup>45</sup> Banyak dari mereka yang ikut andil dalam berbagai demonstrasi dan turun ke jalan. Salah satu contohnya perempuan sudah pernah ikut dalam gerakan mendukung dihapusnya konsesi tembakau kepada Inggris tahun 1890. Dan terdapat demonstran-demonstran lain yang dilakukan oleh perempuan Iran sebelum revolusi konstitusi.

upak Tafreshi, *The Struggle for Freedom*, 7.

Melihat perempuan Eropa banyak yang sudah terampil pada waktu itu, sedangkan Perempuan Iran masih terkungkung dalam kebodohan dan buta huruf, sehingga wajar jika perempuan-perempuan ini tetap gigih melancarkan serangkaian demonstrasi terhadap pemerintah agar mereka diberi hak yang sama dalam berbagai hal. Terutama penekanan terhadap pendidikan, meskipun pendidikan sudah ada yang berlangsung, tetapi penekanan paling penting dalam pendidikan perempuan berpusat pada menjalankan rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Perempuan dilatih untuk mengatur dan mengelola serta menjalankan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.

Pada saat Rezim Shah Pahlevi berkuasa, ia sangat membatasi dan melarang gerakan-gerakan dikalangan masyarakat, kritik hampir tidak diperbolehkan dan Shah Reza sangat alergi dengan segala aktivitas yang mengkritisi pemerintahannya. Represi yang terjadi saat pemerintahan Rezim Pahlevi, membuat gerakan perempuan Iran juga sangat terbatas. Perempuan semakin terlibat dalam semua aspek masyarakat, dan memperoleh lebih banyak otonomi dari pemerintah, meskipun semua itu

Sebelumnya masyarakat Iran termasuk perempuan Iran dalam pemerintahan Dinasti Qajar, dibagi ke dalam beberapa kategori sosial; kategori perempuan kelas atas, dan kelas bawah. Masing-masing kategori menjadikan kehidupan perempuan sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah diatur dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi yang ada sesuai dengan katagori tersebut.

Pada saat pemerintahan Reza Khan terjadi ledakan westernisasi, tetapi westernisasi ini tidak diikuti oleh demokratisasi. Reza Shah

Pada tahun 1928, Majelis Permusyawaratan Nasional mengesahkan Undang-undang yang meminta pakaian seragam untuk dikenakan oleh orang-orang Iran. Berdasarkan Undang undang tersebut, kaum laki-laki di Iran harus menggunakan pakaian ala Eropa. Bahkan dikantor-kantor pemerintahan, pejabat harus menggunakan pakaian ala Barat jika ingin tetap menjabat.

Hal ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya tentang perempuan Iran. Dalam hal berbusana, sebagian besar kaum perempuan menengah keatas, memberikan respon yang baik dan





Para ulama juga sangat menentang pelepasan hijab yang terjadi pada perempuan Iran. Dan semua ulama yang menentang kebijakan Shah tentang larangan memakai cadar dan kerudung mendapat tekanan dan tindakan yang kejam dari Shah. Ia memberikan hukuman yang berat kepada ulama, mereka dihina didepan publik. Dan disuruh untuk melepas sorban, serta mencukur kepala dan jenggotnya.<sup>51</sup>

<sup>51</sup>Tafreshi, 36.





Setelah banyaknya sekolah yang dibangun, maka terjadilah peningkatan jumlah pelajar wanita dua kali lipat. Kegiatan sosial utama pria dan wanita liberal disalurkan ke bidang pendidikan. Antusiasme perempuan tentang pendidikan sangat besar, sehingga mereka sering disediakan staf dan anggaran untuk kegiatan sekolah.<sup>59</sup> Sehingga peningkatan sekolah bagi anak-anak perempuan semakin meningkat.

<sup>58</sup>Tafhresi, 19.

### 3. Undang-undang Hukum Keluarga

Mohammad Reza Pahlevi membuat kebijakan tentang perundang-undangan yang menyangkut kehidupan keluarga. Hukum tersebut dikenal dengan sebutan *Family Protection Acts* yang disahkan pada tahun 1967 dan direvisi pada tahun 1975. Undang-undang Landmark

disebut UU Perlindungan Keluarga disahkan oleh Shah dan disetujui oleh DPR pada tahun 1967. UU Perlindungan Pengadilan Keluarga dikelola oleh pemerintah di mana hakim perempuan sudah bisa duduk dan memiliki yurisdiksi atas perkawinan dan hukum keluarga.<sup>61</sup> Hak untuk perceraian juga diserahkan kepada pengadilan, jadi tidak seenaknya sendiri suami bisa menceraikan istri. Dan dalam kondisi yang sama, baik pria maupun wanita yang ingin melakukan perceraian harus melalui pihak keadilan.

Perempuan diberikan kemampuan untuk menceraikan dengan alasan ketidakcocokan. Perempuan yang sudah berkeluarga, disaat sudah tidak cocok dengan pasangannya, mereka berani mengambil keputusan untuk menceraikan suaminya.<sup>62</sup> Karena perempuan pada masa ini sudah banyak yang bekerja dan dibidang bisa mandiri secara finansial, sehingga sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak lagi bergantung pada pendapatan suami.

Perlindungan Hukum Keluarga 1967 dan 1975 tentang pernikahan juga membatasi anak-anak yang ingin menikah pada usia dini. Perempuan diperbolehkan menikah pada usia 18 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 20 tahun. Dan hak asuh anak ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Sebelum ratifikasi UU Perlindungan Keluarga 1975 tentang poligami, seorang pria bisa menikahi empat istri, tanpa melibatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi.

<sup>61</sup> Ziba Mir Hosseini, *Sharia and National Law in Iran*, 327

<sup>62</sup> Louise Halper, "Law and Women's Agency in Post Revolutionary Iran", dalam *Harvard Journal of Law and Gender*, Vol.28, 95.

### C. Gerakan Perempuan Iran Sebelum Revolusi

Sebelum terbentuknya organisasi-organisasi perempuan di Iran, mereka sudah banyak terlibat dalam berbagai gerakan akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Diantaranya gerakan mendukung penghapusan konsesi tembakau terhadap Inggris pada tahun 1890. Banyak perempuan yang ikut dalam aksi memprotes kebijakan tersebut dan tidak sedikit dari mereka yang turun kejalan, dan banyak dari mereka yang terbunuh.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Tafhresi, 58.

<sup>64</sup> Tamara, *Revolusi Iran*, 38.



Awal abad ke-20, serangkaian artikel yang diterbitkan oleh organisasi perempuan mulai bermunculan. Dimulai dengan pembuatan majalah yang bernama *Danesh* (Pengetahuan) pada tahun 1910, dan koran pertama yang bernama *Shokufeh* di tahun 1913. Kemudian publikasi lain seperti *Women's Letter*, *Women's World*, dan lain-lain bermunculan, namun hanya berlangsung beberapa bulan. *Shokufeh* hanya berlangsung enam tahun hingga kematian Mozayan ol-Sultaneh pada 1919, ia adalah editor pendiri surat kabar *Shokufeh*. Penerbitan-penerbitan tersebut membahas artikel tentang isu-isu perempuan

<sup>67</sup> Tafreshi, 8.

*Jamiat-e Nesvaan-e Vatankhaah-e Iran* (liga Patriotik Wanita) dibentuk pada tahun 1922 oleh sekelompok wanita sosialis yang aktif dalam Revolusi Konstitusional. Liga ini dibentuk oleh Muntaram Sakandari, istri dari Sulaiman Sakandari pemimpin Partai Sosialis, yang bertujuan untuk menghormati hukum dan ritual Islam, mempromosikan pendidikan dan moral yang membesarkan anak perempuan, serta memberikan perawatan untuk anak yatim piatu, khususnya perempuan. Kemudian organisasi ini ditutup pada tahun 1932.<sup>69</sup> Selain organisasi Liga Patriotik Perempuan, ada beberapa organisasi lain yang berdiri, seperti Asosiasi Kebebasan Perempuan, Rahasia Liga Perempuan, Komite Perempuan, Organisasi Perempuan Isfahan, Majelis Revolusi Perempuan dan lain-lain.

Pada tahun 1935, Reza Khan membubarkan semua organisasi wanita, dan ia mendirikan satu majlis untuk perempuan yang bernama *Kanoon-e Banavan* (Pusat Wanita). Organisasi ini diketuai oleh anak perempuannya yaitu Sharos. *Kanoon-e Banavan* adalah salah satu organisasi pertama yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah, karena Organisasi ini berada dibawah nanungan Reza

<sup>69</sup> Ali Akbar Mahdi, "The Iranian Women's Movement: A Century Long Struggle", 431.

Setelah Reza Khan turun tahta, dan diganti oleh anaknya Reza Pahlevi, *Kanoon-e Banavan* masih aktif dalam kegiatannya, dan menekankan kembali berdirinya hak-hak perempuan. Organisasi ini menerbitkan buletin *Zaban Zanan* (Suara Perempuan), untuk mengekspresikan pandangan mereka, namun pada tahun 1942 anggotanya tinggal 60 orang. Sehingga *Kanoon-e Banavan* dibubarkan dan digantikan oleh dua organisasi baru, yakni Partai Perempuan yang didirikan oleh dan *Jamiet Zanan* (Liga Perempuan). Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperbaiki kondisi hukum perempuan, dan menerbitkan koran sendiri dengan nama *Zan Emrus*. Antara tahun 1944-1945, mereka banyak mencetak artikel berita atas nama hak-hak hukum perempuan.

<sup>70</sup> Tafhresi, 40.

## 2. Masuknya Perempuan dalam dunia politik

Setelah beberapa kelompok organisasi perempuan dibubarkan, kaum perempuan tidak lagi memiliki sebuah forum untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas politik. Akibatnya banyak kaum perempuan yang bergabung dengan Mujahidin dalam menentang Shah. Dalam gerakan ini, banyak perempuan yang berhasil dalam aktivitas politiknya, seperti Fatimah Amini. Dia menjadi aktivis politik

<sup>73</sup>Jatmika, 20.

Tetapi wanita yang berani melawan Shah dan aktif dalam gerakan-gerakan perempuan bukan hanya Fatimah. Dalam konfrontasi dengan SAVAK, seorang aktivis perempuan terbunuh dan beberapa diantaranya di hukum oleh polisi rahasia Shah. SAVAK bertindak dengan sangat kejam, tetapi lebih kejam terhadap perempuan, dengan menerapkan sejumlah peraturan yang ketat dan larangan bagi kaum perempuan yang dikeluarkan oleh Shah. Ia menganggap perempuan hanyalah makhluk yang akan menjadi penghambat kemajuan modernisasi yang direncanakan oleh negaranya.<sup>74</sup>

tersebut terus menggencarkan aksi dan pandangannya

<sup>75</sup> Mehri Honarbin, 34.

Pada saat Dr. Mossadeq, seorang tokoh nasionalis yang diangkat menjadi perdana menteri tanggal 28 April 1951, ia merupakan simbol bagi penentang rezim Shah. Walau pemerintahannya sangat singkat, tetapi perempuan Iran cukup punya kesempatan emas untuk aktif dalam perpolitikan Iran. Perempuan banyak mendapat keuntungan dalam peraturan yang dibuatnya. Hingga pada tahun 1952, perempuan mendapat kemenangan mutlak hak suara dalam MUNICIPAL COUNCIL. Sebuah kode jaminan sosial diratifikasi pada tahun 1953, yang memberikan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan juga persamaan dalam pemberian upah bagi perempuan sekalipun telah menikah.

Pada tahun 1962, di bawah perdana menteri dari Assadollah Alam, sebuah dekret dikeluarkan yang memberikan hak bagi perempuan untuk memilih dan berjalan dalam pemilihan provinsi dan kota. Pada 27 Februari 1963 perempuan sekali lagi diberi hak untuk memilih dan menjalankan urusan kantor pemerintahan. Pada tanggal 17 September 1963, pemilu berlangsung dan enam perempuan terpilih ke dalam Majlis sebagai deputi. Majlis yang terdiri dari 160 anggota, terdapat dua wakil perempuan yang ditunjuk Shah. Pada tahun 1965, seorang perempuan ditunjuk sebagai menteri untuk pertama kalinya. Upaya khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa

### 3. Perempuan mendukung Revolusi Iran

Revolusi Islam pada tahun 1979, didukung oleh berbagai kalangan dan masyarakat. Banyak ulama menganggap bahwa program-program modernisasi dan sekularisasi Rezim Pahlevi banyak merusak tatanan Islam.<sup>78</sup> Di Akhir pemerintahan Pahlevi banyak terjadi kerusuhan, mereka umumnya menuntut hak-hak perempuan bisa kembali seperti semula, dan laki-laki kembali memiliki hak sepihak dalam perceraian dan poligami. Banyak golongan dan aktivis perempuan yang awalnya mendukung kebijakan Pahlevi berbalik arah untuk menyeranginya. Dan mereka mendukung kembalinya Ayatullah Khomeini dari pengasingan.

<sup>78</sup> Hammed Shahidian, *Women in Iran: Gender Politics in The Islamic Republic* (Westport, London: Greenwood Press, 2002), 23.

Ketika tanda-tanda revolusi mulai muncul, perempuan juga menunjukkan tanda-tanda kembali ke jati diri sendiri dan identitas yang disembunyikan selama periode Pahlevi dan kontrol Amerika atas Iran bangkit kembali. Fenomena perempuan yang mengenakan jilbab di ruang publik menyebar dan sebagai contoh perlawanan yang bersinar.<sup>79</sup>



Berbagai kalangan perempuan baik dari kalangan menengah ke atas, maupun menengah ke bawah, ikut andil dalam proses demonstrasi anti Shah dengan turun ke jalan-jalan kota. Bahkan ada pula beberapa perempuan yang terlibat konfrontasi bersenjata dengan polisi dan pasukan militer.<sup>81</sup> Ada pula yang ditembak oleh polisi SAVAK. Perempuan pertama yang ditembak mati langsung adalah Manijeh Asraf Zade Kermani.<sup>82</sup> Di manapun perempuan berada, dan berasal dari kelompok manapun, mereka bersama-sama mendukung dan satu visi dalam menggulingkan Rezim Pahlevi.

<sup>81</sup> Ali Akbar Mahdi, 433.

<sup>82</sup> Tamara, 58.



Khomaeni bersikeras akan menegakkan hukum Islam diatas segalanya dan menjadikan negara Iran sebagai Republik Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Hadist. Dia akan membersihkan seluruh unsur-unsur Barat dan mengembalikan masyarakat Iran kepada nilai-nilai Islam. Sehingga Khomeini memutuskan untuk tidak berhubungan dengan dunia Barat dan Iran tidak bisa melakukan kerjasama dengan Barat.

Maka setelah kekuasaan rezim Pahlevi berakhir, Iran memasuki era baru dibawah kepemimpinan para ulama. Melalui referendum pada akhir bulan Maret 1979, mayoritas rakyat Iran (98,7%) menyetujui gagasan Republik Islam Iran (*Jumhuri ye Islame ye Iran*) di bawah pemimpin Dewan Revolusi Iran yang diproklamasikan oleh Imam Khomeini pada tanggal 1 April 1979.<sup>86</sup> Setelah kubu Khomaeni menang dalam perdebatan

<sup>86</sup> Abd Kadir, "Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran," *dalam Jurnal Politik Preofetik*, Volume 5, No.1, 2015. 89.

Setelah diterimanya konstitusi Iran melalui referendum tanggal 2 dan 3 Desember 1979, Iran melangkah ke arah normalisasi kehidupan politik. Konstitusi yang terdiri dari beberapa artikel dibuat berdasarkan hukum Islam yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli dan telah disetujui oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga penting di dalamnya: *Faqih*, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi. Khomeini juga meluncurkan berbagai kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan masa Pahlevi, dimana Khomaeni mewujudkannya dalam konsep *Wilayat al-Faqih* sebagai bentuk pemerintahan Iran yang menjadi cita-citanya selama ini.<sup>87</sup>

dan 3 Desember 1979, Iran melangkah ke arah normalisasi politik. Konstitusi yang terdiri dari beberapa artikel dibuat berdasarkan hukum Islam yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli dan telaah oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga penting di dalamnya, yaitu Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung. Imam Khomeini juga meluncurkan berbagai kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan masa Pahlevi, dimana Khomaeni mewujudkan konsep *Wilayat al-Faqih* sebagai bentuk pemerintahan Iran yang baru. Cita-citanya selama ini.<sup>87</sup>

Semua undang-undang dan produk hukum lainnya harus sesuai dengan asas-asas Islam. Kekuasaan terbesar dipegang oleh *Fa*

dan 3 Desember 1979, Iran melangkah ke arah normalisasi politik. Konstitusi yang terdiri dari beberapa artikel dibuat berdasarkan hukum Islam yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli dan telaah oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga penting di dalamnya, yaitu Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung. Imam Khomeini juga meluncurkan berbagai kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan masa Pahlevi, dimana Khomaeni mewujudkan konsep *Wilayat al-Faqih* sebagai bentuk pemerintahan Iran yang baru. Cita-citanya selama ini.<sup>87</sup>

Semua undang-undang dan produk hukum lainnya harus sesuai dengan asas-asas Islam. Kekuasaan terbesar dipegang oleh *Fa*

Setelah Revolusi tahun 1979, ada perubahan yang cukup mendasar terkait dengan status perempuan Iran. Undang-undang yang berlaku seolah membatasi peran perempuan dalam dunia publik. Hukum-hukum yang berlaku juga membawa perubahan yang berbeda.<sup>90</sup> Adanya keputusan yang jelas mengenai kewajiban memakai jilbab Islam bagi perempuan ketika keluar rumah, dan menyembunyikan semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>91</sup>

Kewajiban memakai jilbab juga berlaku bagi masyarakat perempuan non-Muslim dan para tamu negara. Republik Islam Iran

<sup>91</sup> Ansia Khaz Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution* (Beirut, London: Conflict Forum, 2010), 11.

mewajibkan kaum perempuan berbusana sesuai ajaran Islam versi mereka. Ancamannya ada yang menyebutkan dengan penjara maksimum satu tahun yang diundangkan pada 16 April 1983.<sup>92</sup> Ada pula yang menyebutkan dengan ditetapkan 74 cambukan bagi yang melanggar pemakaian jilbab.<sup>93</sup> Selain itu, warna pakaian dianjurkan berwarna gelap.

Walaupun jilbab diwajibkan, tapi menurut Khomeini cadar lebih baik dan dipercaya lebih pantas. Menurutny cadar adalah simbol revolusi. Karena Khomeini juga selalu menegur putri-putrinya jika tangan putri-putrinya terlihat lebih dari yang diperbolehkan. Khomeini senantiasa mengingatkan anak-anak perempuannya, walaupun memperlihatkan wajah dan telapak tangan itu boleh, tapi lebih baik bagi mereka untuk menutupnya.<sup>94</sup>

Kemudian disamping itu, komite-komite revolusi juga sering memeriksa dan menghukum perempuan yang mengenakan make-up secara berlebihan atau tidak berpakaian sopan (secara Islami). Mereka juga akan ditolak untuk masuk ke kantor-kantor. Khomeini juga menekankan bahwa perempuan yang bepergian tidak boleh mengenakan berbagai jenis parfum.

Perempuan menjadi terbatas dalam hal berinteraksi dengan lawan jenis, mereka hanya diperbolehkan berinteraksi dengan laki-laki yang

<sup>92</sup> Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran dari Achaemenia ke Republik Revolusi Islam* (Jakarta: The Culture Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009), 648.

<sup>93</sup> Reza Arjmand, *Public Urban Space, Gender and Segregation : Women Only Urban Parks in Iran* (New York: Routledge, 2017), 26.

<sup>94</sup> Hamid Algar, *Rays of The Sun: 83 Stories from The Life of The Imam Khomeini and Tranquil Heart 43 Recollection of Imam Khomeini Relating to Prayers*, terj. Leionovar bahseyn (Bandung: Pustaka IIMAN, 2006), 23.

mempunyai hubungan darah seperti saudara laki-laki, ayah atau suami mereka. Perempuan diawasi dengan ketat, ketika mereka pergi keluar rumah dengan seorang laki-laki, maka mereka harus membawa bukti kalau laki-laki yang bersamanya merupakan saudara laki-laki atau masih mempunyai hubungan darah dengan mereka. Jika tertangkap para penjaga revolusioner dan bukti tersebut tidak sesuai maka mereka akan diberi hukuman yang berkisar pada denda untuk dakwaan pengadilan.<sup>95</sup>

Dibentuk Dewan Penyeru Kebajikan dan Pencegah Dosa untuk memantau kerusakan moral yang terjadi dalam masyarakat. Dibentuk pengadilan kemaksiatan dengan hukuman-hukuman berat bahkan hukuman mati. Dibentuk perhimpunan Islam di sekolah dengan pemisahan laki-laki dan perempuan. Serta memantau perilaku guru dan murid yang tidak taat aturan. Revolusi kebudayaan ini dimaksudkan oleh Khomeini guna menenyapkan sisa peradaban Barat dan menempatkan para ulama di bidang pendidikan.<sup>97</sup>

Sementara itu, perempuan diperbolehkan terjun dalam peran publik. Mereka tidak secara resmi dilarang dari ruang publik dan memberi

<sup>98</sup> Valintine M. Moghadam, *Women in The Islamic Republic of Iran : Legal Status, Social Politions, and Collective Action*, (Woodrow Wilson International Center for Scholars on November 16-17, 2004), 2.



perempuan pekerjaan sebagai pegawai negeri. Namun, realitas yang terjadi banyak perempuan Iran yang hampir 24.000 perempuan telah kehilangan pekerjaan mereka karena perempuan diperbolehkan bekerja asalkan itu sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya di lakukan oleh perempuan.<sup>99</sup> Oleh karena itu, banyak terjadi pemecatan terhadap karyawan perempuan setelah revolusi.

Namun, pandangan Ayatollah Khomeini pada perempuan yang ingin duduk di parlemen, ia mengatakan “Dapatkah Anda mencapai kemajuan dengan mengirimkan beberapa perempuan untuk parlemen? Kami mengatakan bahwa mengirim perempuan untuk tempat-tempat ini akan mengakibatkan apa-apa kecuali korupsi”. Sehingga pada masa ini tidak ada perempuan yang terjun dalam dunia politik apalagi masuk dalam jajaran parlemen. Dan hanya ada satu wakil perempuan di Dewan Ahli yang menyusun konstitusi baru Iran.

Salah satu perempuan yang berhasil di wawancarai oleh Nasir Tamara setelah kembalinya Khomaeni ke Iran, dijelaskan, bahwa berkat Khomaeni perempuan tersebut bisa mengutarakan pendapatnya terhadap seluruh persoalan, baik politik, sosial, ekonomi yang menyangkut Iran. Karena di zaman Shah tak ada kesempatan semacam itu. Siapa yang berani mengemukakan hal-hal yang tak sama dengan pendapat rezim langsung di tangkap Savak tanpa pengadilan dan bisa saja langsung dibunuh.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Camara, 26.

<sup>100</sup> Nasir Tamara, *Revolusi Iran* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), 228.

Nasir Tamara juga mewawancarai seorang perempuan bernama Simin Daneshvar, yang merupakan pengarang dan guru besar kesenian Universitas Teheran. Menurutnya kaum perempuan telah berjuang mati-matian selama revolusi dan kini mereka harus berjuang terus mencegah usaha-usaha membatasi peranan mereka. “Kita harus bertempur untuk mendapatkan hak-hak kita dan bila orang-orang (Islam) fanatik mencoba membatasi hak-hak perempuan, maka kaum perempuan Iran akan bertahan menghadapinya. Apalagi di Iran terdapat banyak perempuan terdidik. Di setiap revolusi selalu ada orang-orang oportunis yang coba cari keuntungan bagi mereka sendiri”.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara Daneshvar dengan Monireh Gorji, yakni satu-satunya perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Ahli yang menyusun konstitusi baru Iran. Ia lebih mendukung keputusan-keputusan yang dibuat oleh Khoemini, Gorji mengenal baik hukum-hukum Islam, ia menginginkan juga persamaan hak-hak perempuan di Iran. Tetapi hal itu harus berjalan dalam garis-garis Islam. Gorji ingin agar perempuan berjuang tetapi tanpa melupakan keluarga mereka. “karena perempuan memainkan peranan yang penting sekali di Masyarakat, sebab nasib generasi yang akan datang tergantung di tangan mereka. Maka perempuan harus menganggap peranan mereka lebih penting di keluarga daripada di masyarakat. Hanya perempuan yang dapat



Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa berbagai aturan yang dibuat oleh Khomeini terhadap perempuan sesungguhnya hanya untuk melindungi perempuan. Namun karena kebiasaan yang sudah melekat dalam diri kaum perempuan utamanya yang lebih berorientasi ke Barat membuat mereka merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut justru menjadi penghalang akan hak-hak perempuan yang diinginkan. Dan dikarenakan keadaan sudah berubah, jadi sulit bagi perempuan untuk

Akibat dari kebijakan Khomeini maka banyak menuai berbagai protes yang dilakukan oleh sebagian kaum Perempuan. Khususnya, perempuan kelas menengah ke atas yang notabennya sudah terbiasa menggunakan pakaian ala Barat. Mereka merasa dirugikan akan kebijakan yang dibuat oleh Khomeini. Perempuan kelas menengah ke atas merasa bahwa kebijakan seperti itu menjadi penghalang bagi mereka dalam beraktifitas sesuai dengan yang mereka inginkan, dan hal tersebut dianggap membatasi HAM di Iran.<sup>105</sup> Akibatnya kaum perempuan berdemonstrasi pada 8 Maret 1979 untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka pada pemaksaan memakai jilbab.<sup>106</sup>

Demikian pula, adanya kebijakan-kebijakan tersebut juga menuai terjadinya demonstrasi-demonstrasi terutama dari golongan kelompok politik perempuan sayap kiri yang lebih sekuler dan yang berorientasi untuk menentang pembatasan-pembatasan tersebut. Begitu juga dengan perempuan anggota parlemen dan perempuan pegawai negeri sipil yang membuat tuntutan pada pemerintah untuk kesetaraan dan kesempatan yang lebih besar. Di kalangan kelas menengah, kaum perempuan juga mengecam konstitusi baru terutama soal besarnya kekuasaan yang

<sup>106</sup> Tamara, 246.





mengenai perempuan. Ia mendapat berbagai kritikan dari beberapa partai, seperti Partai Republik Islam dan beberapa ulama konservatif.

Apalagi ia Sering sekali mengambil posisi yang berbeda dengan Khomeini. Misalnya mengenai *Velayat Faqih* yang dianggapnya memberikan kekuasaan terlalu besar pada pemimpin agama. Ia menentang keinginan beberapa tokoh agama yang menurutnya terlalu kolot dan ingin menguasai negara Iran.<sup>111</sup> Bani Sadr juga anti kekerasan, dan anti sensor pers, ia berusaha agar seluruh pers Iran bebas menulis apa yang ingin dikatakan mereka.

Ketika Bani Sadr di wawancarai oleh Nasir Tamara tentang hak-hak manusia dan perempuan dalam Islam Iran, Sadr menjelaskan bahwa masalah perempuan bercadar adalah soal sepele. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak-hak yang sama. Perempuan bukanlah objek, makin tua ia maka harus semakin dihormati.<sup>112</sup>

Sebelumnya, Khomeini sering menjadi penengah antara Bani Sadr dan ulama konservatif ketika ada beberapa permasalahan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Khomeini sangat mengkritik sekutu Bani Sadr, kaum liberal dan Mujahidin Khalq yang dianggapnya membawa bencana pada revolusi. Pada 15 Juni Khomeini mengatakan bahwa Bani Sadr tidak bertindak menurut kehendak pemilihannya dan karena itu ia harus memohon maaf pada bangsa Iran. Pada 21 Juni Majelis memaklumkan bahwa presiden Bani Sadr tidak

<sup>111</sup> Ibid., 274.

<sup>112</sup> Ibid., 301.



Bani Sadr tidak selalu mengindahkan perkataan para ulama konservatif. Dan kebijakan yang dibuat antara Bani Sadr dan Khomeini tidak terlalu sesuai. Dengan demikian, selalu kebijakan Khomeini yang menang, sehingga hak-hak perempuan Iran pada masa Bani Sadr tidak sempat terakomodasi.

Setelah gugurnya Presiden Raja'i, pada 2 Oktober 1981 diadakan pemilihan baru yang ketiga. Kampanye dilakukan dalam suasana yang terancam oleh terorisme. Pemimpin Partai Republik Iran Ali Khamenei terpilih dengan 95% suara, dan diambil sumpahnya pada 13 Oktober 1981. Khamenei adalah salah seorang pendiri Partai Republik Islam dan ketua



keagamaan yang tidak tunggal, tapi tetap diberlakukan. Sehingga demonstrasi tetap terjadi, dimana masih terjadi pemberontakan antara perempuan umum dengan polisi moralitas. Menurutnya kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang diputuskan Imam Khomeini tak ada yang sia-sia.<sup>116</sup>

dasar. Serta pemberian dana yang membantu mendidik mereka menangani aspek keuangan dari kehidupan mereka, dan menciptakan usaha kecil.<sup>118</sup>

Pemerintahan Republik Islam Iran di bawah Khomeini ditandai tidak ada lagi pemisahan antara agama dan negara. Penggabungan agama dan pemerintah berarti menjadi seorang Muslim yang saleh dan warga negara yang baik mempunyai arti yang sama. Kebijakan Khamenei hampir sama dengan kebijakan Khomeini yang menganggap bahwa mendidik dan membesarkan anak-anak supaya sholeh merupakan tugas utama seorang perempuan. Meskipun pandangan seperti itu, perempuan yang boleh bekerja diluar rumah semakin meningkat, seperti bekerja di industri, politik, budaya, dan sektor hiburan.<sup>119</sup>

Ketika Imam Khomeini yang menderita kanker hati meninggal pada 3 Juni 1989, 83 anggota Dewan Ahli mengangkat presiden Sayyid Ali Khamenei sebagai “Pemimpin Revolusi” (Rahbar) dan gelarnya dinaikkan menjadi Ayatullah. Pada 28 Juli 1989 Ali Akbar Hashemi Rafsanjani dipilih sebagai Presiden menggantikan Khamenei. Pada saat yang sama suatu perubahan konstitusi, disetujui oleh pemilih. Dalam perubahan Konstitusi memberi kekuasaan lebih tinggi pada presiden.<sup>120</sup>

### C. Kebijakan Pemerintah Pasca Khomaeni

Ketika *Faqih* dipegang oleh Ali Khamenei menggantikan Ayatullah Khomaeni, pemerintahan Iran, mengalami berbagai kebijakan yang berbeda dari masa Iran di bawah Khomaeini. Pada masa Khamenei

<sup>118</sup> Camara, 7.

<sup>119</sup> Ibid., 37.

<sup>120</sup> Hasyim, 644.

ini ada beberapa presiden yang memerintah di Iran. Diantaranya Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Mohammad Khatami, Mahmoud Ahmadinejad dan beberapa presiden lain hingga sekarang. Namun penelitian ini difokuskan pada masa ketiga presiden diatas.

1. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997)

Pada masa Rafsanjani, Pemerintah Iran cenderung lebih terbuka terhadap perkembangan yang terjadi baik didalam negeri ataupun di luar negeri. Iran kini memasuki zaman baru lagi yang ditandai dengan adanya pergeseran orientasi dari revolusi ke pembangunan. Pergeseran itu dimotori sendiri oleh presiden Rafsanjani.<sup>121</sup>

Salah satunya adalah persoalan ekonomi. Bagi Rafsanjani, kemerdekaan hanya akan mempunyai arti yang nyata apabila Iran kuat secara ekonomi. Ia merasa perlu untuk lebih memusatkan perhatian pada penataan kembali infrastruktur sosial-ekonomi dalam negeri, yang mengalami kerusakan berat akibat revolusi dan perang. Pada masa ini Rafsanjani tidak lagi mempermasalahkan hubungan antara pemerintah Iran dengan pemerintah Amerika Serikat. Sikap keterbukaan ini tentu berkaitan erat dengan lebih membaiknya kehidupan masyarakat Iran dibidang ekonomi dan tingkat pendidikan.

Pada masa ini, kaum perempuan Iran merasa lebih leluasa dan lebih bebas dalam menikmati kehidupan. Bahkan presiden Rafsanjani mendirikan Dewan Sosial-Budaya Perempuan untuk mempromosikan

<sup>121</sup> Jatmika, 64.

status ekonomi dan sosial perempuan. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan “Kebijakan Rekonstruksi” memberikan kesempatan untuk generasi baru perempuan Islam yang sadar akan gender untuk menjalin kerjasama dengan kalangan perempuan sekuler, dan untuk mengembangkan Islam yang modern.<sup>122</sup>

## 2. Kebijakan Mohammad Khatami (1997-2005)

Khatami berhasil mendorong para intelektual, kaum perempuan kota, golongan liberal, golongan kiri, kaum muda dan artis, disamping ulama moderat, berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara untuk memilihnya. Toleransi dan pluralisme diyakini Khatami sebagai strategi budaya untuk mendewasakan Iran. Ia menolak sikap untuk

<sup>125</sup> Nayereh Tohidi, "IRAN", dalam *Women's Rights in the Middle East and North Africa :Progress Amid Resistance*, ed. Sanja Kelly and Julia Breslin (New York: Freedom House, 2010), 2.

Massunah Ebtekar seorang perempuan yang menerima pendidikannya di AS dan yang mewakili Iran dalam konferensi perempuan di Beijing. Ebtekar menjadi Wapres yang membidangi masalah perlindungan lingkungan. Khatami memilih wapres perempuan selain karena latar belakang pendidikannya, juga karena ia banyak berprestasi di bidangnya. Dalam suatu wawancara dengan majalah perempuan bergengsi di Iran *Zanan*, Khatami mengatakan bahwa ia memilih pembantu-pembantunya berdasarkan atas kemampuan mereka bukan jenis kelamin dan mereka harus diberi kesempatan menduduki jabatan tinggi.<sup>128</sup>

<sup>128</sup> Ibid., 77.



Walaupun mendapat tantangan dari ulama konservatif, Khatami terus melanjutkan kebijakannya dan sampai derajat tertentu berhasil. Di dalam pemerintahan Khatami juga ada dua anggota kabinet perempuan; satu di peringkat wakil presiden dan kepala “Departemen Perlindungan Lingkungan” dan yang lainnya sebagai penasihat presiden dan kepala “Pusat Partisipasi Perempuan” (yang telah berubah ke “Pusat Urusan Perempuan dan Keluarga” setelah presiden Ahmadinejad terpilih pada tahun 2005).<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Jatmika, 20.

Kantor kepresidenan juga membentuk biro khusus untuk urusan perempuan pada 1992, sementara kementerian luar negeri membuka biro yang sama pada tahun sebelumnya, yang keduanya dipimpin oleh perempuan. Ada sekitar 600.000 perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri dan 30% dari seluruh guru Iran adalah perempuan. meskipun pendirian liberal yang relatif masih baru ini, para perempuan Iran masih harus menghormati hijab dan pakaian muslim wanita Iran berupa pakaian panjang yang menutupi kepala, badan dan rambut. Bagi Khatami sendiri lebih menyukai sebuah hijab yang memadukan aturan-aturan religius dengan kehormatan seorang muslim perempuan.<sup>131</sup>

Pada masa ini perempuan berpartisipasi dalam aktif

id.,. 79.



Tingkat perdebatan tentang perempuan semakin meningkat, melalui tulisan-tulisan dan advokasi yang dibuat oleh perempuan Iran. Setelah Maret 1998, terdapat pameran buku yang diterbitkan oleh perempuan dengan lebih dari 50 peserta. Pada tahun 1999 jumlah penerbit perempuan meningkat menjadi 236.61, dengan berbagai ketrampilan, kemauan dan ambisi kewirausahaan. Terdapat sebuah forum yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni forum untuk debat sosial-politik yang terbuka serta semakin kritisnya perempuan yang disampaikan melalui pers dan publikasi perempuan.<sup>135</sup>

<sup>134</sup> Rebecca Berlow and Shahram Akbarzadeh, *Prospects for Feminism in The Islamic Republic of Iran*, dalam jurnal *Human Rights Quarterly*, vol.30, no.1, 2008, 27.

Selama tahun akademik 2002-2003, pendaftaran perempuan masuk universitas melebihi laki-laki untuk pertama kalinya sejak universitas didirikan di Iran pada 1930-an. Perempuan memegang 12 persen dari penerbitan direktur rumah dan 22 persen dari anggota Asosiasi Profesional Jurnalis.<sup>137</sup>

Mahmoud Ahmadinejad terpilih menjadi presiden pada 2005, dan dilantik pada 03 Agustus 2005, dengan dukungan penuh dari para pemimpin ulama konservatif. Pada masa Ahmadinejad, Republik Islam mempunyai menteri perempuan pertama.<sup>138</sup> Kampanye presiden Ahmadinejad fokus pada kemiskinan, keadilan sosial, dan redistribusi kekayaan di Iran.

<sup>136</sup> Rebecca, 31.

<sup>137</sup> Moghadam, 3.





Gerakan perempuan Iran di muka publik kian terbatas. Pada tahun 2006, hasil riset dari pusat studi Iran mengungkapkan bahwa 34% warga Iran beranggapan pemerintah tidak berhak mengatur apa yang harus dipakai perempuan Iran.<sup>147</sup> Dengan demikian, pengacara HAM Nasrin Sotoudeh menggelar aksi mogok memperotes aturan berpakaian bagi perempuan yang mengharuskan memakai cadar dan kerudung untuk seluruh anggota tubuh bagi perempuan di dalam penjara.<sup>148</sup> Para perempuan pendukung kelompok garis keras menggelar aksi unjuk rasa memprotes apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pihak berwenang dalam menegakkan hukum wajib jilbab.<sup>149</sup>

id., 22.

---

<https://m.kumparan.com/@kumparanstyle/transformasi-gaya-busana-perempuan-iran-pada-revolusi>, 15 Februari 2019.

<https://m.dw.com/id/perempuan-iran-tuntut-perubahan-di-negaranya/a-47454923>, 15 Februari 2019.

<https://www.bbc.com/majalah-47167017>, 15 Februari 2019

<sup>149</sup><https://www.bbc.com/majalah-47167017>, 15 Februari 2019



Pada masa ini pemerintah mengatur segala hal yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. Mengajukan pemisahan lift untuk laki-laki dan perempuan, taksi untuk perempuan, taman terpisah untuk perempuan, rumah sakit terpisah untuk perempuan, bahkan pasien perempuan hanya bisa dihadiri oleh tenaga medis perempuan.<sup>151</sup>

Pada April 2006, Ahmadinejad mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, ia mengizinkan perempuan melihat pertandingan sepak bola secara langsung di stadion. Sebelumnya perempuan tidak diperbolehkan melihat pertandingan sepak bola secara langsung. Kebijakan ini

<sup>152</sup> Rebecca Barlow, 38.

Akibat penolakan itu, Iran dilanda pergolakan besar pasca pemilihan umum di tahun itu. Lebih dari 12 penerbitan dan situs pro-reformasi ditutup. Sejumlah reformis senior, aktivis, wartawan dan lainnya di tangkap setelah pemilu Juni, dan beberapa disidangkan atas tuduhan mengobarkan kerusuhan. Sejumlah pengacara hak asasi manusia serta pegesam pemerintahan di tangkap dan di penjarakan. Termasuk yang diadili adalah pegawai-pegawai kedutaan besar Inggris dan Prancis serta seorang perempuan Prancis yang menjadi asisten dosen Universitas. Hingga tahun 2010, sudah ada sejumlah orang yang dijatuhi hukuman mati, dan puluhan orang divonis 15 tahun hukuman

Perempuan juga tidak dikecualikan dari tindakan keras tersebut. Pemerintah ingin menargetkan aktivis perempuan dan orang-orang sekuler untuk lebih diorganisir. Perempuan yang menolak ditangkap dan ditahan, sehingga terjadilah penangkapan kasar dan penahanan terhadap banyak perempuan, utamanya perempuan sekuler yang berorientasi LSM, jurnal, dan organisasi dihapus dari akses publik. Karena itu, banyak aktivis perempuan lebih berhati-hati dalam menanggapi pemerintah tentang kampanye moralitas. Aktivisme mereka pindah ke dunia maya yakni Internet.<sup>155</sup>

Hingga pada masa akhir jabatan Ahmadinejad terjadi konfrontasi antara Ahmadinejad dengan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, yang

<sup>156</sup> Ibid., 183.

diduga dipicu oleh pemecatan menteri intelejen yang merupakan sekutu Khamenei. Masa jabatan Ahmadinejad berakhir pada Agustus 2013.

## BENTUK DAN GERAKAN PEREMPUAN IRAN SESUDAH REVOLUSI

Revolusi Islam telah menarik perempuan Iran yang berbeda kategori sosial, budaya, maupun aspirasi ideologis untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam penggulingan Shah Pahlevi, serta menekankan pentingnya aktivis sosial dan politik perempuan Iran.<sup>157</sup> Pada umumnya perempuan di Iran terdiri dari beberapa kategori. Diantaranya adalah *kelompok tradisional, Islamis dan sekuler*. Beberapa diantara kelompok tersebut juga memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda beda.

<sup>160</sup> Sanam vakil, *Women and Politics in The Islamic Republic of Iran*, 75.

<sup>161</sup>Ibid., 83.

<sup>162</sup>Haideh Moghissi, *Populism and Feminism in Iran* (London: Macmillan Press LTD, 1994), 57.

Setelah revolusi Iran berhasil dimenangkan dengan terwujudnya negara Islam Iran, terjadi perubahan kebijakan di negara tersebut, terutama mengenai status perempuan. Adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dewan Revolusi yang utamanya menurut sebagian kaum perempuan sekuler merasa dirugikan, mereka kemudian membentuk koalisi tersendiri dalam menuntut hak-hak mereka yang telah dihapuskan.<sup>164</sup>

Para pemrotes terdiri dari perempuan tua, muda, kaya dan miskin. Tetapi mayoritasnya adalah perempuan sekuler termasuk mahasiswa, profesional, pengangguran atau ibu rumah tangga, dari kelas menengah

<sup>165</sup>Ibid., 236.

Pada Juni 1980, keputusan menggunakan wajib hijab diresmikan. Menanggapi dekrit tersebut, perempuan melancarkan kampanye lagi yang penuh semangat dan menulis pamflet serta artikel untuk membela hak-hak perempuan. Mereka melakukan itu tanpa dukungan dari kelompok laki-laki kiri, progresif, maupun kelompok nasionalis sekuler. Ribuan perempuan meluncurkan aksi keluar ke jalan-jalan tanpa menunjukkan rasa takut. Mereka meneriakkan yel-yel: “Kebebasan Wanita, Kebebasan untuk Masyarakat, dan Kebebasan, Kemerdekaan, Matilah Diktator”.<sup>168</sup>

<sup>166</sup> Firozeh Kashani, *Conceiving Citizens: Women and The Politics of Motherhood in Iran* (New York: Oxford University Press, 2011), 211.

<sup>168</sup> Hamideh Sedghi, *Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling*, (New York: Cambridge University Press, 2007), h.250



Respon lain dari kelompok perempuan Islamis juga mengumpulkan kekuatan dan menciptakan gerakan feminis Islam vokal yang biasa disebut “Masyarakat Perempuan Revolusi Islam” yang didirikan oleh sekelompok perempuan setelah revolusi untuk melestarikan identitas budaya gender. Masyarakat Perempuan Revolusi Islam mendirikan cabang di kota-kota provinsi dan memulai program peningkatan kesadaran bagi perempuan. Para perempuan reformis Islam memiliki visi masyarakat Islam yang ideal dan peran perempuan ada di dalamnya. Kelompok Ini didirikan bertentangan dengan Muslim perempuan tradisional. Menurut mereka Islam yang benar adalah

<sup>170</sup> Firozeh Kashani, *Conceiving Citizens: Women and The Politics of Motherhood in Iran*, 212.

Di awal tahun 1980-an, terjadi perbedaan pandang antara kelompok perempuan sekuler dengan perempuan Islam. Menurut pandangan perempuan Sekuler, negara dieksploitasi oleh partisipasi perempuan Islam sebagai cara yang efektif untuk menghancurkan gerakan perempuan sekuler yang berjuang melawan dominasi tatanan patriarkal. Sedangkan di mata perempuan Islam, negara telah menyediakan langkah-langkah untuk pemberdayaan perempuan, dengan mengirim mereka keluar dari rumah untuk terlibat dalam aktivisme politik.<sup>172</sup>

Perempuan Islam tradisional sangat menentang aktivis perempuan sekuler yang menginginkan hak-hak perempuan dan penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan-gerakan tersebut hanya dianggap oleh perempuan Islam sebagai pengikut budaya Barat yang tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan menurut perempuan sekuler, kebijakan yang dibuat setelah revolusi sangat merugikan bagi perempuan Iran. Sehingga mereka menolak kebijakan tersebut dan membuat berbagai aksi demonstrasi di jalan-jalan.<sup>173</sup>

<sup>172</sup> Elaheh Rostami-Povey, The Women's Movement in Historical Context, *dalam Women, Power and Politics in 21<sup>st</sup> Century Iran*, (ed. Tara Povey) (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2012), 25

Selain itu, ada pula gerakan yang dilancarkan oleh aktivisme perempuan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berjuang untuk hak-hak perempuan melalui aktivisme masyarakat sipil yang dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an. Mereka memiliki peran penting dalam menentang negara, mempertahankan demokrasi dan mengangkat isu kompatibilitas dan modernitas Islam, serta hak perempuan dalam Islam.<sup>175</sup>

Beragam gerakan perempuan lainnya yang tumbuh pada tahun 1990-an

<sup>175</sup> Ibid., 28.

adalah melalui jurnal perempuan, penerbit, seniman, pengacara, hakim dan aktivis politik.<sup>176</sup>

Sejak tahun 1990-an atmosfer di Iran juga mulai berubah akibat dari penentangan yang aktif secara terus menerus untuk meminta pengembalian kebijakan. Mereka mendefinisikan kembali bentuk dan warna hijab, serta menginginkan perhatian inti dari pemerintah Islam dan pendirinya. Di pusat-pusat kota, perempuan muda mulai merubah model pakaian yang mereka kenakan di tempat publik atau secara pribadi, mereka mengikuti mode yang mereka inginkan. Perempuan muncul di tempat-tempat formal atau universitas di mana polisi gender dan revolusi mencegah masuknya perempuan jika tidak berpakaian dengan benar.

Di daerah Teheran utara umumnya, mereka tidak menggunakan kerudung dan celana panjang longgar tapi banyak yang mengenakan jaket pendek yang lebih ketat dan memakai pakaian yang berubah dari sebelumnya. Mereka mengenakan syal kecil atau penutup kepala dengan memperlihatkan poni mereka, demikian juga mereka menggunakan make up yang disembunyikan di bawah kacamata hitam, tapi ada juga yang tidak memperlihatkan. Selain itu, mereka tidak mematuhi aturan pemisahan transportasi umum dan jenis kelamin, perempuan duduk di sebelah orang laki-laki asing ketika kursi bus di bagian perempuan sudah penuh.<sup>177</sup>

<sup>180</sup> Azadeh Kian-Thiebaut, *From Islamization to the Individualization of Women in Post-revolutionary Iran*, 131

Namun, pada tahun 2004 terjadi kekecewaan oleh sebagian kaum perempuan terhadap pemerintah reformis Khatami, karena mereka telah melakukan pendekatan damai terhadap ulama konservatif, yang dibuktikan dengan penutupan surat kabar dan jurnal serta penangkapan aktivis hak-hak perempuan dan aktivis pekerja.<sup>181</sup>

Setelah pemilu Juni 2009 dunia menyaksikan kebangkitan dari gerakan menyerukan reformasi demokratis dan legislatif di jalan-jalan Iran. Gerakan ini melibatkan partisipasi ratusan ribu perempuan yang

182 Kadivar, 131



Dalam pemilihan majelis, manuver politik memastikan bahwa hanya kandidat yang pro-Republik Islam yang akan terpilih menjadi anggota Majelis dan bisa berpartisipasi nasional di republik Islam.<sup>187</sup> Dengan demikian semakin terlihat bahwa rata-rata perempuan yang terjun dalam dunia politik pada awal-awal revolusi adalah perempuan Islamis yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Islam dan tidak menentang pemerintahan republik Islam Iran. Dengan demikian mereka, bisa dipastikan bahwa perempuan dari kelompok sekuler mengalami penurunan partisipasi dalam bidang politik. Namun, gerakan mereka tidak pernah berhenti meskipun ranah politik tidak berada dalam wilayah mereka. Perempuan yang membuat terobosan dapat dikatakan berasal dari latar belakang Islam yang ketat.

Pada Pemilu Majelis tahun 1980 ada 25 perempuan mencalonkan diri sebagai anggota Majelis, mulai dari usia 24 sampai 60 tahun yang diajukan oleh berbagai partai politik pro Islam dan partai politik oposisi. Yang terpilih menjadi anggota Majelis hanya 3 orang perempuan, yakni Monireh Gorji, Azam Taleghani dan Goharolsharieh Dastgheib.

Pada tahun 1981 oposisi Majelis banyak yang meninggal saat insiden terbunuhnya Ali Raja'i yang terpilih menjadi presiden. Sejak saat itu, pemilu majelis menghasilkan kandidat perempuan lebih sedikit. Hanya ada dua perempuan yang terpilih ke Majelis yakni Ategeheh Rajai dan Maryam Behruzi. Dalam dua pemilu berikutnya tahun 1984 dan 1988, ada

<sup>187</sup> Paidar, 309.





Secara khusus, perempuan pada pemerintahan Khatami dituntut untuk dimasukkan dalam posisi pembuatan kebijakan.<sup>191</sup> Perempuan bisa menjabat sebagai Gubernur Daerah dan Regional. Di bawah pemerintahan reformis Khatami (1999-2005) dua perempuan terpilih sebagai gubernur wali kota. Zahra Nejadbahram, terpilih sebagai wakil gubernur Teheran, dan Parvaneh Mafi sebagai wakil gubernur Shemiranat county di provinsi Teheran.<sup>192</sup>

Terpilihnya kembali Khatami pada tahun 2001, banyak yang berharap bahwa Khatami akan mencalonkan perempuan sebagai menteri kabinet. 163 anggota reformis dari Parlemen ke-6 menandatangani surat resmi yang mengungkapkan harapan ini. Namun, tidak ada perempuan dalam daftar calon kabinet Khatami yang disampaikan kepada parlemen. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut telah di tentang oleh anggota ulama konservatif sehingga ia harus menarik diri dari membuat keputusan seperti itu. Khatami mengumumkan bahwa ia tidak mau mengambil risiko

<sup>191</sup> Ali Akbar Mahdi, "Perceptions of Gender Roles Among Female Iranian Immigrants in the United States", *dalam Women, Religion and Culture in Iran*, ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2002), 217.





Parlemen ke-7 mengabaikan konsep kesetaraan dan anggota parlemen perempuan yang baru tidak menantang anggota parlemen konservatif laki-laki untuk mengabaikan isu-isu perempuan. Mereka berpendapat bahwa prioritas perempuan harus reproduksi, tugas perempuan adalah didalam rumah dan bahwa partisipasi perempuan di ruang publik bukanlah prioritas. Dengan demikian, mereka telah diusulkan untuk mengurangi jam kerja perempuan sehingga mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah.

Dalam kabinet kedua Ahmadinejad (2009) anggota parlemen perempuan telah berfokus untuk menegakkan kode pakaian Islam perempuan. Dan hal tersebut telah mensyaratkan konfrontasi konstan terhadap kaum perempuan, bahwa Jilbab Islam dalam definisi kelompok konservatif harus digunakan, apabila kaum perempuan melanggar, maka Polisi akan memaksa dan menghukum perempuan.<sup>197</sup>

Dengan demikian terdapat jumlah penurunan anggota parlemen perempuan di parlemen ke-8, dibandingkan dengan Parlemen ke-6 dan 7. Kurangnya komitmen terhadap isu-isu hak-hak perempuan di Parlemen ke-7 memiliki dampak negatif pada kehadiran perempuan di lembaga penting ini. Berdasarkan dominan konservatif yang berkuasa, anggota parlemen perempuan dalam periode ini difokuskan pada isu-isu budaya dan peran perempuan terbatas dalam lingkup publik.

<sup>197</sup> Elaheh Koolae, 145.

Meskipun partisipasi perempuan dalam pemerintahan Ahmadinejad kembali terbatas, namun perempuan tidak pernah berhenti untuk berpartisipasi dan tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka dan menantang persepsi yang keliru untuk mengamankan tempat yang selayaknya dalam perjuangan kekuasaan politik di Iran.

Kehadiran perempuan di bidang eksekutif bahkan lebih terbatas. Perempuan dilarang menjadi presiden, bahkan tempat untuk menjadi menteri oleh perempuan belum ada sama sekali setelah revolusi. Baru ada pada tahun 2009 ada satu wakil perempuan yang menjadi menteri kesehatan yakni Marzieh Vahid Dastjerdi memenangkan persetujuan sebagai menteri kesehatan.<sup>200</sup>

<sup>199</sup> Jamileh Kadivar, 132.

<sup>200</sup> Vakil, 18.



perempuan dengan menyatakan perempuan harus berusaha untuk mencari pengetahuan dan kesalehan. Pengetahuan bukanlah monopoli kelompok tertentu tetapi milik semua, dan itu adalah tugas dari semua laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pengetahuan.<sup>203</sup>

Sistem pendidikan di Iran adalah tanggung jawab dari tiga kementerian, yakni Departemen Pendidikan, Departemen Ilmu, Riset dan Teknologi untuk universitas non-medis dan Departemen Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran untuk disiplin medis.

Menurut konstitusi 1979, republik Islam Iran memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan gratis untuk semua orang di semua tingkat serta fasilitasi dan perluasan pendidikan tinggi.<sup>204</sup> Sistem pendidikan secara keseluruhan sangat terpusat dan pemerintah memainkan peran penting dalam menjalankan sistem ini melalui perumusan kebijakan pendidikan.<sup>205</sup> Meskipun sikap pemerintah terhadap Pendidikan positif bagi perempuan, namun, pemerintah memiliki kebijakan dan strategi yang berbeda dalam Pendidikan mereka.

Jurusan yang dianggap tidak cocok untuk perempuan tidak boleh diambil, demikian masuknya siswa perempuan untuk bidang-bidang tertentu di perguruan tinggi dibatasi melalui penetapan kuota. Kuota ini menyatakan bahwa dalam berbagai disiplin ilmu jumlah siswa perempuan antara 10 sampai 20% dan 30% untuk disiplin ilmu medis.

<sup>203</sup> Vakil, 54.

<sup>204</sup> Roksana Janghorban, *Women's Empowerment in Iran*, 227.

<sup>205</sup> Khadijeh Aryan, *The Boom in Women's Education*, 36.



Perubahan kurikulum di perkenalkan termasuk instruksi lebih religious. Bahasa Arab diwajibkan di sekolah menengah, bahasa Inggris tidak boleh diajarkan di tingkat sekolah dasar dan kewajiban pengajaran sejarah Islam dan revolusi Islam. Singkatnya, dosis besar ideologi Islam disuntikkan ke kurikulum sekolah dan universitas.<sup>207</sup>

Lembaga Pendidikan dilarang menerima siswi dan guru perempuan yang tidak memakai hijab. Seragam Islam wajib bagi gadis-gadis sekolah yang berumur lebih dari 9 tahun. Guru perempuan dan administrator sekolah diancam dipecat oleh Departemen Pendidikan dengan pemecatan jika mereka tidak memakai hijab.<sup>208</sup>

Pada akhir tahun 1980-an, kebijakan bagi perempuan untuk pengambilan jurusan di pendidikan tinggi lebih longgar. Dengan demikian perempuan mengalami kemajuan besar di perguruan tinggi.

<sup>208</sup>Ibid., 317.

Sejak 1980-an kebijakan pemerintah telah mendorong segmen besar masyarakat untuk masuk ke pendidikan tinggi. Ini termasuk alokasi kuota khusus bagi orang-orang yang memainkan peran penting di perang Iran-Irak (1980-1988), seperti orang-orang cacat akibat perang, mantan tahanan perang dan keluarga para syuhada. Ada juga kuota untuk atlet Olimpiade dan orang-orang yang telah berprestasi dalam kontes ilmiah. Mereka diberi kesempatan untuk masuk universitas tanpa melakukan tes sebagai hadiah untuk prestasi mereka.<sup>209</sup>

Tahun 1985, Kompleks Ilmu Agama untuk perempuan dibuka di Qom. Kompleks ini dikenal sebagai *The Society of Zahra* (Jam makan ol-Zahra), yang menerima lebih dari 500 siswa perempuan. Itu adalah



Pada Mei 1989 dinyatakan bahwa pembatasan masuknya perempuan ke geologi dan pertanian dicabut. Segera setelah itu diumumkan bahwa pembatasan kuota masuknya perempuan dihapuskan sama sekali di bidang medis, para medis dan beberapa prodi di bidang teknik. Ini adalah hasil dari lobi Dewan Sosial dan Budaya Perempuan yang mencerminkan sifat Republik Islam pada perempuan.

Selama masa presiden Mohammad Khatami (1997-2004), prioritas khusus kebijakan untuk kesempatan perempuan diperluas. Perempuan yang masuk pendidikan tinggi memiliki skala yang besar, yakni 38,2%. Persentase perempuan dalam pendidikan tinggi melebihi dari era pra-revolusioner. Sedangkan tahun 2000 partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi meningkat menjadi 47,2%. Pembatasan secara bertahap telah dihapus, yang berdampak pertumbuhan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi pada tingkat yang luar biasa. Pada tahun 2000, 60% dari siswa yang masuk perguruan tinggi adalah perempuan.<sup>214</sup>

Jumlah masuknya perempuan yang lebih tinggi dalam pendidikan telah membuat khawatir para pembuat kebijakan dari ulama konservatif yang menyebabkan berbagai perdebatan kontroversial

<sup>214</sup>Aryan, 42.

dalam pemerintahan dan di media-media. Beberapa kelompok konservatif mengadakan seminar dan konferensi untuk mengkritik kehadiran perempuan yang lebih tinggi di tingkat pendidikan. Akibatnya, Departemen Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran menciptakan sistem kuota membatasi masuknya siswa perempuan untuk beberapa program, dan mengalokasikan tempat universitas untuk perempuan muda hanya di kota-kota asal mereka. Keterbatasan ini telah mengangkat banyak kritik, sehingga pilihan perempuan telah berkurang secara signifikan.

Perhatian utama dari beberapa kelompok konservatif adalah bahwa siswa perempuan akan menggantikan siswa laki-laki dalam penempatan pekerjaan tradisional didominasi laki-laki. Mereka takut bahwa ini akan mengubah norma-norma dan nilai-nilai yang ditetapkan dan dapat menyebabkan laki-laki tinggal di rumah dan perempuan yang bekerja di luar rumah.

Sehingga sejak tahun 2005 pemerintah yang didominasi oleh kelompok konservatif telah mengadopsi strategi yang menekankan peran reproduksi perempuan untuk menikah, membentuk keluarga dan menjadi ibu rumah tangga yang baik.<sup>215</sup> Kemudian tahun 2007-2008 negara memberlakukan sistem kuota, menawarkan 60 persen dari

<sup>215</sup>Ibid., 45.

Di bawah pemerintahan Islam, perempuan juga memainkan peran penting dalam kegiatan sosial. Ada salah satu jamaah perempuan yang dibangun setelah revolusi, untuk membentengi mereka dari budaya Barat yang menurut mereka telah merusak budaya perempuan Iran. Adanya pemimpin agama perempuan dari kelompok Islam, dimana para pemimpin agama perempuan telah berjuang untuk menemukan peran diri mereka sendiri di tempat yang lebih tinggi dari masyarakat Islam.

Daerah pertama bagi aktivitas dan pengaruh dari para pemimpin perempuan adalah pelatihan keagamaan yang dipimpin oleh mereka. Pemimpin agama perempuan dianggap penting di Republik Islam, dan kesempatan yang cukup disediakan bagi perempuan untuk dilatih sebagai pemimpin agama. Namun, ada batasan bagi pemimpin agama perempuan, yakni tidak mengizinkan mereka untuk mengeluarkan dekrit keagamaan.<sup>217</sup>

kelompok perempuan keagamaan (Islamis) kebanyakan hidup di daerah Teheran Selatan. Seperti kelompok keagamaan yang biasa mengadakan pertemuan keagamaan antar perempuan. Pertemuan tersebut biasa disebut *Jalaseh*, dan anggota yang ikut dalam pertemuan

<sup>216</sup> Zahra Nejadbahram, “Women and Employment”, *dalam Women, Power and Politics in 21<sup>st</sup> Century Iran*, ed. Tara Povey, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2012), 79.

tersebut dianjurkan untuk memakai tampilan dengan jilbab yang tepat menurut mereka, dengan menggunakan cadar hitam dan stoking hitam buram.<sup>218</sup>

kepemimpinan Islam, termasuk Farideh Mostafavi putri Ayatollah Khomeini. Mereka berlari untuk kelas melek huruf dan kelas menjahit untuk perempuan dan dibangun klinik kesehatan untuk perempuan. Perempuan yang menjalankan organisasi sebelumnya telah dididik di sekolah-sekolah perempuan Islam sebelum revolusi atau mereka yang telah menerima pendidikan Islam di rumah.<sup>221</sup>



Negara pasca-revolusioner, harus menyajikan kebijakan ketenagakerjaan bagi perempuan yang akan berbeda dari sebelum revolusi dan Islami. Selain itu, tenaga kerja perempuan adalah masalah yang sensitif bagi pemerintah Islam karena berpotensi menjadi ancaman serius bagi peran laki-laki sebagai pencari nafkah di dalam keluarga.<sup>224</sup> Sumber lain dari kecemasan dalam kaitannya dengan pekerjaan perempuan adalah tentang hilangnya keutamaan ibu bagi perempuan. Ayatollah Khomeini sangat sensitif terhadap ancaman ini.<sup>225</sup>

<sup>223</sup> Leyla Sarfaraz, *Women's Entrepreneurship in Iran: Role Models of Growth-Oriented Iranian Women Entrepreneurs*, (Shiraz Iran: Springer International Publishing, 2017), 7.

<sup>225</sup> Zahra, 81.

Kebijakan awal Islamisasi tentang pemisahan gender mengakibatkan partisipasi tenaga kerja perempuan menurun drastis. Serta mengakibatkan banyak perempuan kehilangan pekerjaan mereka. Karena pemerintah Islam menganjurkan untuk tinggal di rumah dan mengembangkan kesadaran Islam serta praktek kesopanan.<sup>227</sup>

Meskipun banyak perempuan yang sudah sampai pada pendidikan tingkat tinggi, namun sistem pendidikan tidak menyiapkan perempuan muda untuk berpartisipasi dalam posisi pengambilan keputusan atau kepemimpinan politik dan kekuasaan.<sup>228</sup> Sehingga perempuan yang memiliki pendidikan tinggi belum tentu akan mencapai pekerjaan yang tinggi pula. Karena ketika perempuan melamar pekerjaan yang tinggi terutama dalam pekerjaan formal, mereka jarang mendapat tempat sebagai posisi tinggi seperti menjadi kepala departemen, dekan fakultas, atau rektor universitas. Perempuan juga masih mengalami diskriminasi dalam hal upah dan promosi pekerjaan.<sup>229</sup>

Tahun-tahun awal pasca-revolusioner sejarah menyaksikan sejumlah serangan dari pemerintah Islam terhadap tenaga kerja perempuan, yakni pembersihan di tempat-tempat kerja. Target pertama dan terpenting adalah sektor publik, di mana kaum intelektual dari era

<sup>229</sup> Caroline M. Brooks, *Moment's of Strength : Iranian Women's Rights and the 1979 Revolution*, 50

Sejumlah besar perempuan dipecat karena memprotes pengenaan wajib hijab. Tentara dan polisi perempuan dipecat, sehingga kebanyakan perempuan sekuler yang bekerja terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka.<sup>231</sup> Departemen Keuangan telah melarang perekrutan perempuan sejak 1979. Pembetulan disediakan oleh seorang pejabat adalah bahwa hal itu tidak diinginkan untuk perempuan yang akan dikirim pada misi kerja, dan bahwa itu adalah melawan Shariat bagi perempuan untuk duduk dengan laki-laki dalam pertemuan.

Pusat-pusat industri dan pabrik-pabrik, temuan survei menunjukkan kebijakan perekrutan yang benar-benar sewenang-wenang. Sementara ada satu pabrik yang telah berhenti merekrut perempuan sejak tahun 1985, yang lain merekrut perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Kebijakan yang akan dilakukan adalah

<sup>231</sup> Bahramitash, 21.



Pada saat Rafsanjani menjabat sebagai presiden (1989-1997), ia berbicara kepada Majelis agar mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam profesi seperti mengajar dan menjadi dokter yang akan mengakibatkan mereka membantu perempuan lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh Azam Taleghani, seorang perempuan yang berada di wakil Majelis. Ia menuntut pelatihan dokter lebih lanjut kepada perempuan untuk mengobati pasien perempuan.<sup>235</sup>

Pada tahun 1990-an perempuan ditantang oleh realitas ekonomi, sehingga lebih banyak perempuan memasuki tenaga kerja pasar dan ekonomi informal. Tapi banyak perempuan terus tetap bertanggung jawab untuk bekerja di rumah. Pada tahun 1992 pembentukan Dewan Sosial dan Budaya Perempuan mempromosikan masuknya perempuan

<sup>235</sup> Bahramitash, 25.

dalam ruang publik. Sehingga lebih banyak perempuan mulai memasuki pasar tenaga kerja.<sup>236</sup>

Pada puncak gerakan reformasi di bawah Presiden Khatami, Beberapa perempuan telah menduduki posisi tinggi seperti wakil presiden, wakil menteri, gubernur daerah dan wakil gubernur regional. Pada periode ini lebih banyak perempuan memiliki akses ke pendidikan dan pekerjaan serta peluang diciptakan bagi perempuan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada kehidupan sosial-ekonomi dan politik negara.

Pada tahun 2002, meskipun kondisi politik dan pasar menjadi lebih ramah untuk tenaga kerja partisipasi angkatan perempuan, namun banyak perempuan memilih dan mengikuti jejak budaya mereka yakni untuk tetap tinggal di rumah daripada berpartisipasi dalam pasar.<sup>237</sup> Hal ini terlihat pada sebuah survei sampel dari 250 perempuan yang telah menikah dan berpendidikan, yang dilakukan di Teheran pada 2002. Dalam survei ini, 20% dari perempuan dipekerjakan dan sisanya adalah ibu rumah tangga. Saat ditanya “jika anda dan suami anda memiliki gaji yang sama, tetapi salah satu dari kalian diharuskan untuk berhenti dari pekerjaan karena dikhawatirkan mengurangi kehadiran anda di rumah. Apa yang anda pilih?”. Rata-rata 78% dari respon memilih untuk tetap tinggal di rumah dan keluar dari pekerjaan, sedangkan 17% mengharapkan suami yang berhenti bekerja.

<sup>236</sup> Ibid., 26.

<sup>237</sup> Hamideh Sedghi, 231.

Dalam hal ini dikarenakan hukum adat dalam masyarakat Iran yang telah menghambat kemajuan perempuan dalam mencapai posisi tinggi dalam pekerjaan. Mereka percaya bahwa pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan mencapai posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Oleh karena itu, kesempatan kerja, terutama di posisi tinggi dibuat khusus untuk laki-laki. Perempuan juga terpinggirkan di posisi ini karena budaya yang dominan tidak menerima laki-laki bekerja di bawah otoritas perempuan dan sebagai hasilnya banyak laki-laki merasa sulit untuk bekerja di bawah manajer dan kepala departemen perempuan.<sup>238</sup>

wirausaha, bisnis keluarga, usaha mikro dan bekerja rumahan dari berbagai macam, dan ini tidak memerlukan izin dari suami.

Pada hari-hari awal Republik Islam banyak perempuan kehilangan pekerjaan mereka. Meskipun terbatas pada dinding rumah tangga, beberapa perempuan memproduksi kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan, sehingga mereka bergabung dengan jajaran pekerja mandiri di sektor informal. Lainnya pensiun dari kehidupan publik dan mengabdikan waktu mereka sebagai istri dan ibu.<sup>240</sup>

Rata-rata perempuan yang telah kehilangan pekerjaan telah memulai bisnis sendiri di dalam rumah. Perempuan bisa menghasilkan pendapatan dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di pusat-pusat perkotaan, sebagai penenun karpet dan buruh di bidang pertanian dan peternakan di daerah pedesaan, serta menjahit dan menenun.<sup>241</sup>

Ada yang membuka praktik aerobik, yoga, meditasi, dan kelas pijat, serta membuka salon rambut di rumah mereka. Banyak perempuan mengalokasikan ruang hidup mereka untuk menjual pakaian atau barang-barang rumah tangga, ada juga yang melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga untuk membeli barang untuk dijual. Mereka yang bisa berbahasa Inggris dan Perancis bisa memberikan les privat di rumah.<sup>242</sup>

<sup>240</sup> Roksana Bahramitash, Atena Sadegh and Negin Sattari, *Low-Income Islamist Women and Social Economy in Iran*, (New York: Palgrave Macmillan, 2018), 19.

<sup>241</sup> Parvin, 331.

<sup>242</sup> Sedghi, 238.



Ahmadinejad membuat perubahan radikal dalam urusan lokal dan internasional, yang merugikan negara baik secara politik dan ekonomi. Pemerintah Eropa dan Amerika memberlakukan sanksi paling keras terhadap perekonomian Iran. Amerika Serikat menjadi musuh lanjutan diplomatik, dan menjadi lebih terbatas dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.<sup>244</sup> Kesulitan ekonomi sangat merugikan tenaga kerja perempuan dan selama kepresidenan Ahmadinejad, pangsa perempuan dari angkatan kerja turun dari 19,96% di 2005 menjadi

244 Bahramitash,30



## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra dan Pasca Revolusi 1979)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

tidak mampu menjadikan perempuan berkembang menjadi lebih baik lagi. Setelah banyaknya organisasi perempuan yang sudah terbangun lalu dibubarkan, menjadi bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya membela hak-hak perempuan dalam hal kesetaraan, sehingga gerakan perempuan terus berlanjut setelah revolusi.

2. Kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi sangat beragam. Ayatullah Khomeini yang merupakan tokoh sentral dalam revolusi Iran telah menjadikan Iran sebagai negara Islam yang menegakkan hukum Islam di atasnya. Sebagai seorang yang berpengaruh, keputusannya terhadap perempuan telah membuat kontroversi di kalangan perempuan, pasalnya Iran sebelum revolusi adalah negara yang sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya barat. Ada kelompok perempuan yang bersedia menerima peraturan baru yang dibuat Khomeini, ada pula yang sangat menentang kebijakan Khomeini utamanya mengenai perempuan. Golongan penentang Khomeini biasa disebut perempuan sekuler, menurut mereka kebijakan seperti pemisahan antara laki-laki di tempat publik, wajib hijab bagi perempuan, serta peran mereka di ruang publik sangat membatasi gerakan mereka. Meskipun perempuan diperbolehkan terjun dalam peran publik, namun realitasnya banyak perempuan yang kehilangan peran mereka di ruang publik, seperti pemecatan karyawan perempuan, larangan menjadi hakim, serta batasan perempuan lainnya. Khomeini lebih menekankan bahwa perempuan lebih baik

Namun, pada masa Ahmadinejad aturan yang dibuat olehnya membuat batasan-batasan terhadap perempuan seperti p Khomaeni.

3. Bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah revolusi m dinamika yang begitu tinggi. Perbedaan kepemimpinan di membawa suasana yang berbeda-beda. Meskipun gerakan p Iran banyak di tentang oleh berbagai ulama konservatif, p

- dinamika yang begitu tinggi. Perbedaan kepemimpinan di membawa suasana yang berbeda-beda. Meskipun gerakan Iran banyak di tentang oleh berbagai ulama konservatif, tetap berjuang dan meminta keadilan serta kesetaraan dalam hal. Mereka membela hak-hak perempuan sebagai warga negara mereka inginkan. Gerakan yang dilakukan oleh perempuan setelah revolusi lebih berani, sehingga terjadi berbagai perlawanan terhadap pemerintah Iran. Tidak hanya itu, perempuan semakin aktif dan terjun dalam berbagai bidang, baik dalam sosial, politik, dan ekonomi. Bentuk lain dari gerakan perempuan

LI

a saran sebagai berikut :

- memperluas bahasan yang belum bisa peneliti lakukan. Karena

kemungkinan gerakan perempuan Iran juga terpengaruh dari budaya Persia yang terbilang sebagai kerajaan terbesar pada waktu itu, utamanya pada masa Cyrus Agung. Namun, peneliti belum mampu mengungkapkan hal tersebut. Sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya.

2. Melihat perjuangan perempuan di Iran, utamanya sebelum revolusi dan sesudah revolusi yang hanya sampai masa Ahmadinejad, perjuangan mereka sangat luar biasa untuk dipelajari lebih lanjut. Utamanya perjuangan mereka dalam mempromosikan hak-hak perempuan Iran di era modern ini yang begitu rumit dan sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada para pembaca agar bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang bisa didapatkan setelah membaca tulisan ini.
3. Melalui penelitian ini, kita bisa melihat bahwa perjuangan seorang perempuan untuk mencapai tingkat yang sama dengan laki-laki akan selalu mengalami hal yang rumit. Utamanya di negara Iran yang menjadikan hukum Islam dan belum bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin modern ini, sehingga kita bisa melihat, bahwa perempuan selalu dianggap sebagai makhluk lemah yang masih berada jauh dibawah laki-laki (masih dalam konteks pembahasan hingga tahun 2013) meskipun perubahan yang terjadi memang ada. Oleh karena itu, penulis berharap kepada masyarakat luas, agar bisa diambil manfaat dan pelajaran yang berharga.

Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta:



- UI Press. 1985.
- Kashani, Firozeh. *Conceiving Citizens: Women and The Politics of Motherhood in Iran*. New York: Oxford University Press. 2011.
- Khomeini, Ahmad. *Mir'atu Syamsi*, terj. Muhdor Assegaf. Bogor: Cahaya. 2004.
- Khomeini, Imam. *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2002.
- King, Angela E.V. *Gender Mainstreaming an Overview*. New York: United Nations. 2002.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam bagian 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.
- Moghissi, Haideh. *Populism and Feminism in Iran*. London: Macmillan Press LTD. 1994.
- Nashat, Guity. *Women and Revolution in Iran*. Boulder: Westview Press. 1983.
- Paidar, Parvin. *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran*. Cambridge: Syndicate of the University of Cambridge. 1995.
- Puar, Yusuf Abdullah. *Perjuangan Ayatullah Khomeini*. Jakarta: Pustaka Antara. 1979.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor: PT IPB Press. 2013.
- Sarfaraz, Leyla. *Women's Entrepreneurship in Iran: Role Models of Growth Oriented Iranian Women Entrepreneurs*. Shiraz Iran: Springer International Publishing. 2017.
- Shahidian, Hammed. *Women in Iran: Gender Politics in The Islamic Republic*. Westport, London: Greenwood Press. 2002.
- Syamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2007.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada. 2014.
- Tamara, Nasir. *Revolusi Iran*. Jakarta: Sinar Harapan. 1980.
- Vakil, Sanam. *Women and Politics in The Islamic Republic of Iran*. New York: The Continuum International Publishing Group. 2011.
- Ziba Mir Hosseini, *Sharia and National Law in Iran*, New York: I.B. Tauris & Co Ltd. 2006.



- Moghadam, Valintine M. *Women in The Islamic Republic of Iran : Legal Status, Social Politions, and Collective Action*. Woodrow Wilson International Center for Scholars on November 16-17, 2004.
- Moinifar, Hesmat Sadat. "Participation of Women in Iran's Polity". Dalam *Journal GEMC*, Special Issue 2, No.1. 2013.
- Mortimer, Louis R. "Country profile: Iran," dalam *Library of Congress: Federal Research Division*. Washington DC: Kessinger Publishing. 2008.
- Nejadbahram, Zahra. "Women and Employment". dalam *Women, Power and Politics in 21<sup>st</sup> Century Iran*. ed. Torab, Azam. *Performing Islam: Gender and Ritual in Iran*. Leiden: Koninklijke Brill.
- Povey, Tara. "The Iranian Women's Movement in its Regional and International", dalam *Women, Power, and Politics in 21<sup>st</sup> Century Iran*, ed. Tara Povey. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2012.
- Pramono, Budi. Perubahan Politik Oleh Faktor Agama. dalam *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. vol.13, No.1, 1983.
- Rostami-Povey, Elaheh. "The Women's Movement in Historical Context. Dalam *Women, Power and Politics in 21<sup>st</sup> Century Iran*. ed. Tara Povey. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2012.
- Sabahi, Fabrian. "Gender and The Army of Knowledge in Pahlavi Iran," dalam *Women, Religion and Culture in Iran*. ed. Sarah Ansari & Vanessa Martin. New York: Routledge. 2002.
- Sadat, Heshmat. *Participation of Women in Iran's Polity*. dalam jurnal GEMC, no.4, vol.2, 2013.
- Sudrajat, Ajat. "Imam al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran". Dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Nomor1, Tahun XV, 1996.
- Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme dalam Islam". Dalam *Jurnal Penelitian SAWWA*, Volume 7, Nomor 2. 2012.
- Taurat, Azam. "The Politicization of Women's Religious Circles in Post revolutionary Iran". dalam *Women, Religion and Culture in Iran*. ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2002.

- Tohidi, Nayereh. "IRAN". dalam *Women's Rights in the Middle East and North Africa : Progress Amid Resistance*, ed. Sanja Kelly and Julia Breslin. New York: Freedom House. 2010.
- Wise, Krysta. *Islamic Revolution of 1979: The Downfall of American-Iranian Relations*, Legacy: Vol. 11:Iss. 1, Article 2, 4.

# Ensiklopedia

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Ensiklopedia Perdaban Islam Persia*. Jakarta: Tazkia Publishing. 2012.
- Josep, Suad and Afsana Na Mabadi. *Ensynclopedia of Women and Islamic Cultures: Family, Law and Politics*. Leiden: Koninklijke Brill NV. 2005.

## Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Aini, Ni'mah Nur. "Kebijakan Mohammad Khatami Tentang Wanita di Iran". skripsi, UIN Sunan Kalijaga, fakultas Adab dan Humaniora. 2016.
- Brooks, Caroline M. "Moment of Strength: Iranian Women's Rights and The 1979 Revolution". Tesis, Colby College, Lux Mentis Scientia. 2008.
- Camara, Andrea De La. "Women's Rights in Iran: During The Years of The Shah, Ayatullah Khomeini, and Khamenei". (Tesis, Orlando Florida: Major Program in International and Global Studies in the College of Sciences, 2012).
- Nawawi, Imam. "Peran Perempuan dalam Revolusi Iran". (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015.
- Tafreshi, Poupak. "The Struggle for Freedom, Justice, and Equality : The History of The Journey of Iranian Women in The Last Century". Tesis, Washington University, St. Louis. 2010.

## Internet

<https://en.wikipedia.org/wiki/Iran> (23 Desember 2019)

<https://megapolitan.kompas.com//read/2009/08/07/07110331/ahmadinejad.pilih.menri.perempuan>, (15 Februari 2019)

<https://internasional.kompas.com/read/2018/11/02/16593491/biografi-tokoh-dunia-mahmoud-ahmadinejad-presiden-iran-yang-sederhana?page=all>, 15 februari 2019

<https://tirto.id/ahmadinejad-yang-terjungkal-di-laga-pencalonan-presiden-iran-cnie>, 15 Februari 2019

<http://tirto.id/zumba-dan-deretan-larangan-di-iran-cuIV>, 15 Februari 2019

<https://m.kumparan.com/@kumparanstyle/transformasi-gaya-busana-perempuan-iran-sebelum-and-sesduah-revolusi>, 15 Februari 2019.

<https://m.dw.com/id/perempuan-iran-tuntut-perubahan-di-negaranya/a-47454923>,  
15 Februari 2019.

<https://www.bbc.com/majalah-47167017>, 15 Februari 2019

<https://internasional.kompas.com/read/2010/11/20/0112368/iran.bebaskan.2.pere>  
mpuan.pengacara, 15 Februari 2019

<http://www.juancole.com/2009/tohidi-women-and-presidential-elections.html>  
(diakses 13, Oktober 2018)